

Panduan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan

Pembelajaran dari Provinsi NTT





Panduan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan

(Pembelajaran dari Provinsi NTT)



**Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 2 Tahun 2025**

**Tentang
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Panduan Fasilitasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan
Provinsi Nusa Tenggara Timur



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
KELOMPOK RENTAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, maka perencanaan pembangunan perlu melibatkan semua pihak termasuk kelompok masyarakat rentan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelibatan kelompok masyarakat rentan dalam perencanaan pembangunan diperlukan musyawarah perencanaan pembangunan yang inklusif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INKLUSIF KELOMPOK RENTAN DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang memastikan semua kelompok masyarakat marjinal dan yang tereklusi terlibat dalam proses Pembangunan.
10. Kelompok Rentan adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, penyintas bencana dan perdagangan orang, dan komunitas adat terpencil.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan yang selanjutnya disebut MUSIK KEREN adalah sebuah langkah afirmasi yang memberikan peluang untuk memastikan keterlibatan aktif Kelompok Rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.
12. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, serta keterwakilan Kelompok Rentan.
13. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh fasilitator yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
14. Fasilitator adalah orang yang berperan sebagai pemandu dan pengarah dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi Kelompok Rentan dalam diskusi.
15. Unsur Pemerintah adalah organisasi perangkat daerah, komisi daerah, dan lainnya yang tugas pokok dan fungsinya membantu pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan terkait Kelompok Rentan.
16. Unsur....

16. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil adalah organisasi nonpemerintah yang melakukan tugas pendampingan terhadap kelompok rentan.
17. Organisasi Komunitas Rentan adalah organisasi nonpemerintah yang dibentuk secara mandiri oleh Kelompok Rentan atau komunitas tertentu.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan MUSIK KEREN di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan MUSIK KEREN adalah

- a. mengintegrasikan isu dan permasalahan pembangunan Kelompok Rentan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. membahas dan menyepakati usulan dari Kelompok Rentan; dan
- c. sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Forum Perencanaan Inklusif.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. MUSIK KEREN RPJMD;
- b. MUSIK KEREN RKPD;
- c. Fasilitas MUSIK KEREN; dan
- d. Pemantauan dan Pengawasan.

Pasal 5

Asas Penyelenggaraan MUSIK KEREN adalah:

- a. Transparan;
- b. Partisipatif;
- c. Kesetaraan;
- d. Tanpa Diskriminasi;
- e. Akuntabel;
- f. Pemberdayaan; dan
- g. Berkelanjutan.

Bab II....

BAB II
MUSIK KEREN RPJMD

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) MUSIK KEREN RPJMD diawali dengan tahap persiapan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan tim;
 - b. penyusunan jadwal kegiatan;
 - c. sosialisasi rancangan awal;
 - d. pemetaan peserta; dan
 - e. penguatan kapasitas.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas Unsur Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Komunitas Rentan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Delegasi mewakili peserta Kabupaten/Kota;
 - d. Perwakilan Kelompok Rentan
 - e. Praktisi/Akademisi;
 - f. CSO/LSM/Ormas;
 - g. Tokoh masyarakat;
 - h. Tokoh Agama;
 - i. unsur pengusaha/investor/filantropi; dan
 - j. unsur lain yang dipandang perlu.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara MUSIK KEREN RPJMD adalah Bapperida.
- (2) MUSIK KEREN RPJMD dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sebagai bagian dari tahapan penyusunan RPJMD.
- (3) Dalam hal terjadi Perubahan RPJMD, maka MUSIK KEREN RPJMD akan disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Pasal 10

- Ruang lingkup Pembahasan MUSIK KEREN RPJMD adalah:
- a. permasalahan dan isu strategis terkait Kelompok Rentan;
 - b. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kelompok Rentan; dan
 - c. program pembangunan daerah yang Inklusif.

Pasal 11....

Pasal 11

- (1) Mekanisme penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD diatur sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan MUSIK KEREN RPJMD; dan
 - b. penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD:
 1. pemaparan dan pembahasan materi materi dari para nara sumber;
 2. pembagian dan diskusi Kelompok Rentan;
 3. diskusi kelompok dipandu oleh Fasilitator; dan
 4. pembagian kelompok diskusi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman.
- (2) Perumusan rancangan hasil MUSIK KEREN RPJMD dilakukan oleh Fasilitator dan Bapperida berdasarkan rangkuman hasil paparan dan tanggapan peserta MUSIK KEREN RPJMD.
- (3) Hasil MUSIK KEREN RPJMD dalam bentuk berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Pasca Musrenbang

Pasal 12

- (1) Rekapitulasi hasil MUSIK KEREN RPJMD dirumuskan oleh Bapperida berdasarkan Isu, Kewenangan, prioritas daerah, urusan bidang pemerintahan, perangkat daerah.
- (2) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Provinsi dibawa dan dibahas bersama dalam Tahapan Penyusunan RPJMD.
- (3) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil Rumusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat akan sampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB III

MUSIK KEREN RKPD

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 13

- (1) MUSIK KEREN RKPD diawali dengan tahap persiapan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan tim;
 - b. penyusunan jadwal kegiatan;
 - c. sosialisasi rancangan awal;
 - d. pemetaan peserta; dan
 - e. penguatan kapasitas.

Pasal 14....

Pasal 14

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas Unsur Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Komunitas Rentan.
- (2) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan MUSIK KEREN RKPD.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan;
- b. Perangkat Daerah;
- c. Delegasi mewakili peserta Kabupaten/Kota;
- d. Perwakilan Kelompok Rentan;
- e. Praktisi/Akademisi;
- f. CSO/LSM/Ormas;
- g. Tokoh masyarakat;
- h. Tokoh Agama;
- i. unsur pengusaha/investor/filantropi; dan
- j. unsur lain yang dipandang perlu.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara MUSIK KEREN adalah Bapperida.
- (2) MUSIK KEREN RKPD dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD.

Pasal 17

Ruang lingkup pembahasan MUSIK KEREN RKPD adalah:

- a. permasalahan dan isu strategis terkait Kelompok Rentan;
- b. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kelompok Rentan;
- c. program pembangunan daerah yang Inklusif;
- d. kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang inklusif serta penentuan sasaran dan lokasi.

Pasal 18

- (1) Mekanisme penyelenggaraan MUSIK KEREN RKPD, diatur sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan MUSIK KEREN RKPD; dan
 - b. penyelenggaraan MUSIK KEREN RKPD:
 1. pemaparan dan pembahasan materi dari para nara sumber;
 2. pembagian dan diskusi Kelompok Rentan;
 3. diskusi kelompok dipandu oleh Fasilitator; dan
 4. pembagian kelompok diskusi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman.

(2) Perumusan....

- (2) Perumusan rancangan hasil MUSIK KEREN RKPD dilakukan oleh Fasilitator dan Bapperida berdasarkan rangkuman hasil paparan dan tanggapan peserta MUSIK KEREN RKPD.
- (3) Hasil MUSIK KEREN RKPD dalam bentuk berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Pasca Musrenbang

Pasal 19

- (1) Rekapitulasi hasil MUSIK KEREN RKPD dirumuskan oleh Bapperida berdasarkan isu, kewenangan, prioritas daerah, urusan bidang pemerintahan, perangkat daerah.
- (2) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Provinsi dibawa dan dibahas bersama dalam tahapan penyusunan RKPD.
- (3) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat akan sampaikan kepada Pemerintah Pusat;

BAB IV

FASILITAS MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD

Pasal 20

- (1) Fasilitas untuk pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD harus aksesibel bagi semua peserta.
- (2) Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi tahapan dan jadwal MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap berita acara pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan MUSIK KEREN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Perangkat Daerah terkait, Gubernur melakukan pembinaan dan pendampingan.

(3) Pemerintah....

(3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan inklusi di Kabupaten/Kota.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPd secara teknis akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPd yang ditetapkan oleh kepala Bapperida.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

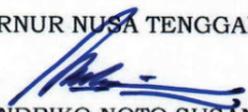
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 6 Februari 2025

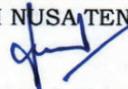
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 6 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 002

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang PeraturanPerundang-undangan Ahli Muda	

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
KELOMPOK RENTAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

BERITA ACARA

HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG INKLUSI KELOMPOK RENTAN

DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMD

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN -

Pada hari Tanggal, sampai dengan tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah diselenggarakan Musrenbang inklusi tingkat Provinsi yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar peserta hadir peserta dalam lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang inklusi tingkat Provinsi
2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan Saran dari seluruh peserta Musrenbang inklusi Kelompok Rentan RPJMD tingkat Provinsi terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi yang dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang inklusi tingkat Provinsi, maka pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Seluruh peserta Musrenbang inklusi Tingkat Provinsi

MENYEPAKATI

- a. Permasalahan dan Isu Kelompok Rentan serta Usulan dari Kelompok Rentan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
- b. Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Inklusi Kelompok Rentan Tahun untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun..... -

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal

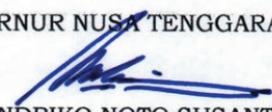
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Selaku pimpinan sidang Musrenbang inklusi

Tanda Tangan
(Nama)

Mewakili peserta Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan Tingkat Provinsi

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF
KELOMPOK RENTAN DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG INKLUSI KELOMPOK RENTAN
DALAM PENYUSUNAN RKPD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN

Pada hari Tanggal, sampai dengan tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah diselenggarakan Musrenbang inklusif Kelompok Rentan tingkat Provinsi yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar peserta hadir peserta dalam lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang inklusif tingkat Provinsi
2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan Saran dari seluruh peserta Musrenbang inklusif Kelompok Rentan tingkat Provinsi terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi yang dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang inklusif Kelompok Rentan RKPD tingkat Provinsi, maka pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Seluruh peserta Musrenbang inklusif Kelompok Rentan RKPD tTngkat Provinsi

MENYEPAKATI

1. Permasalahan dan Isu Kelompok Rentan serta Usulan dari Kelompok Rentan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
2. Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Inklusif Tahun untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya

....., tanggal

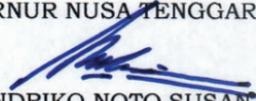
Gubernur Nusa Tenggara Timur
Selaku pimpinan sidang Musrenbang inklusi

Tanda Tangan
(Nama)

Mewakili peserta Musrenbang Inklusi Tingkat Provinsi

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
dst				

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	14
Daftar Singkatan	15
I. Pendahuluan	17
II. Kedudukan MUSIK KEREN	20
III. Musrenbang Inklusif sebagai Tahap Pra Musrenbang Provinsi	24
IV. Prinsip Fasilitasi	26
V. MUSIK KEREN RPJMD	28
VI. MUSIK KEREN RKPD	30
VII. Panduan Tambahan	33
VIII. Formulir-formulir	44
IX. Pengenalan Peraturan Menteri Dalam Negeri 90/2019 dan SIPD	48
X. Penutup	55
Lampiran I Contoh Format MUSIK KEREN	57
Lampiran II MUSIK KEREN RKPD	58
Lampiran III Daftar Organisasi Masyarakat Sipil Kelompok Rentan	166

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan hikmat-Nya, Panduan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan - Pembelajaran dari Provinsi NTT ini dapat tersusun. Panduan ini menjadi bagian integral dari proses Musrenbang yang dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat desa hingga nasional, guna merumuskan perencanaan dan penganggaran daerah.

Dengan panduan ini, diharapkan Musrenbang Inklusif untuk Kelompok Rentan (MUSIK KEREN) dapat terlaksana secara rutin, sebagai bagian dari input dalam forum Musrenbang Provinsi NTT. *Musik Keren*, mencerminkan semangat inklusi dan kesetaraan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi, dan mencapai kesepakatan mengenai visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran dalam penyusunan program kegiatan pada dokumen perencanaan daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, terutama kepada tim internal Bappeda Provinsi NTT, perangkat daerah terkait, dan Tim SKALA yang telah mendukung proses perencanaan *Musrenbang Inklusif untuk Kelompok Rentan* (MUSIK KEREN). Proses ini menjadi langkah awal dalam melembagakan Musrenbang Inklusif sebagai mekanisme partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS), dengan harapan agar partisipasi kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dapat terwujud dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, Maret 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Dr. Alfonsus Theodorus, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740119 199903 1 004

Daftar Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terarah)
FORUM PD	Forum Perangkat Daerah
JBI	Juru Bahasa Isyarat
Lansia	Lanjut Usia
GEDSI	Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)
Musik Keren	Musrenbang Inklusi untuk Kelompok Rentan
Musrenbang	Musyawaharah Perencanaan Pembangunan
NGO	Non-Governmental Organization (Organisasi Non-Pemerintah)
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPDis	Organisasi Penyandang Disabilitas
Pokir	Pokok Pikiran
SDGs	Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SIPD	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
SPPN	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
SPM	Standar Pelayanan Minimal
RADPD	Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas
Renja OPD	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Panduan Fasilitas Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

I. PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan: Kunci Pembangunan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan rencana pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pendekatan dalam perencanaan pembangunan mencakup pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta mekanisme atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yang terintegrasi dalam Musrenbang di berbagai tingkatan. Namun, partisipasi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih sering dianggap simbolik, sehingga kebutuhan mereka belum sepenuhnya terakomodasi.

Pembangunan yang inklusif memerlukan penerapan prinsip-prinsip dasar yang dapat menjamin partisipasi semua kelompok masyarakat, terutama terkait dengan gender dan disabilitas. Beberapa prinsip utama yang harus diterapkan untuk mewujudkan Musrenbang yang inklusif meliputi partisipasi aktif, aksesibilitas, kesetaraan gender, keadilan sosial, serta pendidikan dan kesadaran. Partisipasi aktif berarti setiap individu, termasuk perempuan dan penyandang disabilitas, harus memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses perencanaan melalui forum yang ramah dan aksesibel.

Aksesibilitas memastikan bahwa semua informasi dan fasilitas pendukung dapat diakses, seperti penyediaan materi dalam format braille atau audio, serta lokasi yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kesetaraan gender mendorong perempuan untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan melalui promosi pemimpin perempuan dan pelatihan yang meningkatkan kepercayaan diri. Keadilan sosial memastikan perencanaan pembangunan berorientasi pada kebutuhan kelompok terpinggirkan, sementara pendidikan dan kesadaran bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya inklusi dan hak-hak Perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, komunitas adat dan lainnya.

Rendahnya partisipasi bermakna dari kelompok rentan dipengaruhi oleh berbagai kendala, termasuk keterbatasan pengetahuan, kapasitas, dan akses terhadap layanan dasar. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTT melalui Musrenbang Inklusi untuk Kelompok Rentan (Musik Keren) berupaya menciptakan forum yang adaptif, responsif, dan berkeadilan. Forum ini dirancang secara khusus untuk memberikan kesempatan bagi kelompok rentan menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) reguler dilaksanakan. Dengan adanya Musik Keren, diharapkan usulan dari kelompok rentan dapat lebih terdengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Langkah ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, tetapi juga selaras dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menekankan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, Musrenbang inklusif diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang holistik, merata, dan mampu mencerminkan kebutuhan semua lapisan masyarakat.

B. Tujuan

1. Memberikan petunjuk langkah teknis dalam memfasilitasi kegiatan musrenbang yang inklusif di Tingkat provinsi
2. Sebagai panduan bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Musik Keren baik kelompok rentan, pemerintah, organisasi Masyarakat sipil pendamping kelompok rentan dan pemangku kepentingan lainnya.

C. Sasaran

1. Kelompok Rentan yaitu Perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, penyintas bencana dan perdagangan orang, komunitas adat terpencil dan lainnya.
2. Fasilitator Musik Keren
3. Peserta Musik Keren

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

- Pembangunan Nasional;
4. Undang Undang Pembentukan Provinsi NTT
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
 7. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
 8. Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
 13. Peraturan Gubernur NTT Nomor 048 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi NTT
 14. Peraturan Daerah No 05 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah.
 15. Peraturan Gubernur NTT Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

E. Penjelasan Penggunaan Panduan

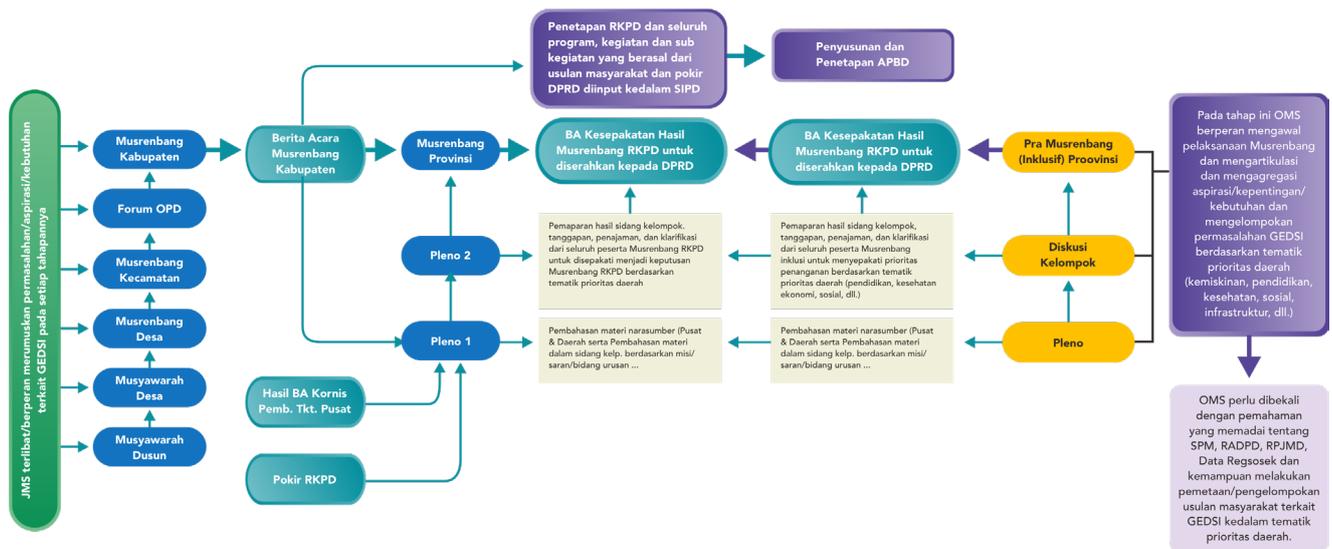
Panduan ini disusun untuk memberikan arahan umum dalam penyelenggaraan MUSIK KEREN. Proses dan tahapan penyampaian usulan agar dapat diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPJMD (setiap 5 tahun) maupun RKPD (setiap tahun), akan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya Pemerintah Provinsi. Sebagai contoh, pelaksanaan MUSIK KEREN untuk RPJMD dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RKPD, dengan pemisahan isu atau usulan berdasarkan jangka pendek dan jangka panjang.

II. KEDUDUKAN MUSIK KEREN



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme formal dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga nasional. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat terserap dan diintegrasikan dalam perencanaan program serta penganggaran daerah.

Dalam alur Musrenbang, Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (Musik Keren) menjadi salah satu tahapan kunci untuk memastikan bahwa kelompok rentan—seperti penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak—memiliki akses yang setara dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Musrenbang Inklusif ditempatkan dalam rangkaian proses sebelum Musrenbang Provinsi, yaitu dalam tahap Pra Musrenbang (Inklusif) Provinsi.



A. Alur dan Kerangka Musik Keren Tingkat Provinsi NTT

1. Proses Awal di Tingkat Desa hingga Kabupaten

Musrenbang dimulai dari tingkat dusun dengan Musyawarah Dusun, kemudian berlanjut ke Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan akhirnya Musrenbang Kabupaten. Pada tingkat kabupaten, dilakukan forum perangkat daerah (FORUM PD) yang membahas hasil dari musrenbang tingkat sebelumnya.

Setelah proses di tingkat kabupaten selesai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Kabupaten, yang menjadi dasar untuk pembahasan di Musrenbang tingkat provinsi.

2. Peran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Selain jalur musrenbang dari bawah, ada juga masukan dari DPRD yang berasal dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Pokir ini adalah hasil aspirasi masyarakat yang diserap oleh anggota dewan melalui reses atau pertemuan dengan konstituen.

3. Proses di Musrenbang Provinsi

Pada tingkat provinsi, Musrenbang Provinsi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Pleno 1: Pembahasan materi yang disampaikan oleh narasumber dari pusat dan daerah, serta pembahasan materi berdasarkan bidang/urusan tertentu.
- Pleno 2: Pemaparan hasil sidang kelompok, tanggapan, serta penyesuaian usulan dari seluruh peserta musrenbang terhadap RKP yang akan disepakati.

Setelah itu, hasil dari Musrenbang Provinsi dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKP untuk diserahkan kepada DPRD.

4. Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (Musik Keren)

Sebelum Musrenbang Provinsi dilaksanakan, dilakukan Pra Musrenbang (Musik Keren) Provinsi, yang bertujuan untuk memastikan partisipasi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, perempuan, dan anak terlantar. Dalam tahapan ini:

- Dilakukan diskusi kelompok untuk mengidentifikasi aspirasi kelompok rentan terkait isu-isu prioritas daerah seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur.
- Hasil diskusi kelompok kemudian dibahas dalam sesi pleno.
- OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) berperan dalam mengawal dan mengagregasi aspirasi kelompok rentan serta membantu dalam pemetaan isu berdasarkan tematik prioritas daerah.

Agar OMS dapat menjalankan perannya dengan baik, mereka perlu dibekali dengan pemahaman tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), RADPD, RPJMD, RKPD, serta data responsif GEDSI untuk mengelompokkan usulan masyarakat secara lebih sistematis.

5. Finalisasi dan Penyusunan APBD

Setelah semua tahapan selesai, hasil dari Berita Acara Kesepakatan Pra Musrenbang (Inklusif) serta Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD akan digunakan dalam penyusunan dan penetapan APBD. RKPD yang telah disusun, termasuk program dan kegiatan yang berasal dari usulan masyarakat serta Pokir DPRD, akan diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan ditetapkan menjadi APBD.

B. Jadwal Pelaksanaan Musik Keren

Musrenbang inklusif Kelompok Rentan dilaksanakan sebelum dilaksanakan Renja Perangkat Daerah dan Musrenbang reguler sebagai sesi pra-Musrenbang untuk menyusun rekomendasi yang akan diintegrasikan dalam Musrenbang tingkat provinsi. Penentuan waktu tersebut dimaksudkan agar usulan sudah teridentifikasi untuk mendukung prioritas daerah atau nasional serta kewenangan dan urusan dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Durasi penyelenggaraan Musrenbang Inklusif dilaksanakan sekurang-kurangnya 1-2 hari untuk memastikan diskusi mendalam dan pengolahan hasil yang baik.

Matriks jadwal pelaksanaan MUSIK KEREN (Musrenbang Inklusif Kolaboratif) yang diselaraskan dengan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat provinsi.

Tahapan Musrenbang	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Utama	Keterlibatan Kelompok Rentan
Musyawarah Dusun	Oktober - November	Identifikasi awal kebutuhan masyarakat di dusun dan pengusulan program desa.	Sosialisasi dan penjangkaran aspirasi kelompok rentan di dusun.
Musrenbang Desa	Desember - Januari	Penyusunan usulan prioritas desa berdasarkan hasil musyawarah dusun.	Penyampaian langsung aspirasi kelompok rentan di forum Musrenbang Desa.

Musrenbang Kecamatan	Januari - Februari	Konsolidasi usulan desa menjadi prioritas kecamatan.	Verifikasi dan advokasi usulan kelompok rentan agar masuk prioritas kecamatan.
Musrenbang Kabupaten/Kota	Februari - Maret	Pembahasan dan penyusunan prioritas pembangunan daerah berdasarkan usulan kecamatan dan Pokir DPRD.	Pemantauan apakah usulan kelompok rentan telah terakomodasi.
Forum Perangkat Daerah (Forum PD)	Maret - April	Sinkronisasi program perangkat daerah dengan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota.	Diskusi dengan OPD untuk memastikan program inklusif bagi kelompok rentan.
Pra Musrenbang (Inklusif) Provinsi (MUSIK KEREN)	April	Identifikasi dan pemetaan usulan kelompok rentan sesuai tematik pembangunan provinsi (kemiskinan, pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, dll).	Kelompok rentan menyampaikan usulan secara tematik, diskusi kelompok untuk menyusun rekomendasi inklusif.
Musrenbang Provinsi	April - Mei	Penyusunan RKPD berdasarkan hasil Pra Musrenbang Inklusif dan Forum PD.	Pemaparan hasil diskusi kelompok inklusif dalam pleno Musrenbang Provinsi.
Penyusunan RKPD dan Penyelarasan dengan KUA-PPAS	Mei - Juni	Penyusunan RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Provinsi untuk diserahkan ke DPRD.	Pemantauan apakah rekomendasi MUSIK KEREN masuk dalam RKPD.
Penyusunan RAPBD dan Pembahasan di DPRD	Juli - Oktober	Penyusunan RAPBD berdasarkan RKPD dan kesepakatan KUA-PPAS.	Advokasi lanjutan agar anggaran inklusif masuk dalam RAPBD.
Penetapan APBD	November - Desember	RAPBD disahkan menjadi APBD melalui persetujuan DPRD dan Gubernur.	Evaluasi akhir terhadap komitmen anggaran inklusif bagi kelompok rentan.

Catatan Penting:

- **MUSIK KEREN ditempatkan dalam tahap Pra Musrenbang Provinsi** agar kelompok rentan memiliki ruang khusus untuk menyuarakan aspirasi mereka sebelum masuk ke pleno Musrenbang Provinsi.
- **Siklus ini mengikuti jadwal perencanaan dan penganggaran daerah sesuai regulasi yang berlaku**, sehingga partisipasi kelompok rentan dapat lebih sistematis dan terakomodasi dalam kebijakan daerah.
- **Pemantauan hasil rekomendasi inklusif** dilakukan di setiap tahapan, mulai dari Musrenbang Desa hingga penetapan APBD, untuk memastikan bahwa usulan kelompok rentan tidak hilang dalam proses birokrasi.

III. MUSRENBANG INKLUSIF SEBAGAI TAHAP PRA MUSRENBANG PROVINSI



A. Ketentuan Umum

1. Kelompok Rentan adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, penyintas bencana dan perdagangan orang dan komunitas adat terpencil.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan yang selanjutnya disebut MUSIK KEREN adalah sebuah langkah afirmasi yang memberikan peluang untuk memastikan keterlibatan aktif Kelompok Rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.
3. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha/investor,

- pemerintah pusat, serta keterwakilan Kelompok Rentan.
4. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh fasilitator yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
 5. Fasilitator adalah orang yang berperan sebagai pemandu dan pengarah dan memiliki kemampuan untuk memfasilitasi Kelompok Rentan dalam diskusi.
 6. Unsur Pemerintah adalah organisasi perangkat daerah, komisi daerah, dan lainnya yang tugas pokok dan fungsinya membantu pemerintah daerah dalam melakukan kebijakan terkait Kelompok Rentan.No 2 Tahun 2025.
 7. Unsur Organisasi Masyarakat Sipil adalah organisasi nonpemerintah yang melakukan tugas pendampingan terhadap kelompok rentan.
 8. Organisasi Komunitas Rentan adalah organisasi nonpemerintah yang dibentuk secara mandiri oleh Kelompok Rentan atau komunitas tertentu.

B. Akronim Musik Keren

MUSIK KEREN adalah penyebutan versi singkat dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan di Provinsi NTT (Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025). Penamaan Musik Keren juga mencerminkan beberapa pertimbangan filosofis. Pertama, akronim Musik Keren yang secara langsung mencerminkan tujuan utama Pergub ini yakni untuk memastikan bahwa kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, lansia, kelompok minoritas, dan kelompok marjinal lainnya) dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan yang inklusif. Kedua, Akronim Musik Keren familiar bagi masyarakat NTT, yang kaya akan budaya musik dan tradisi bermusik dalam kehidupan sosial. Nama Musik keren tidak hanya terdengar menarik dan mudah diingat tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan, harmoni, dan gotong royong dalam membangun daerah. Ketiga, Akronim Musik Keren mempermudah penyebutan dan sosialisasi dan menjadi branding kebijakan inklusif di Provinsi NTT.

C. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan MUSIK KEREN adalah:

1. mengintegrasikan isu dan permasalahan pembangunan Kelompok Rentan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. membahas dan menyepakati usulan dari Kelompok Rentan; dan
3. sebagai acuan bagi Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Forum Perencanaan Inklusif.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. MUSIK KEREN RPJMD;
2. MUSIK KEREN RKPD;
3. Fasilitas MUSIK KEREN; dan
4. Pemantauan dan Pengawasan.

IV. PRINSIP FASILITASI



A. Transparan

Penyelenggaraan Musik Keren dilakukan secara terbuka, di mana seluruh informasi terkait proses, agenda, mekanisme, dan hasil musyawarah dapat diakses oleh semua peserta, termasuk kelompok rentan. Contoh: Fasilitator menyampaikan informasi terkait jadwal, agenda, dan mekanisme musyawarah dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

B. Partisipatif

Musik Keren menempatkan semua pihak, terutama kelompok rentan berperan sebagai subyek yang aktif dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam penyusunan rencana pembangunan. Contoh: dalam penyusunan usulan program menggunakan JBI atau teks tertulis untuk memastikan informasi dapat diakses oleh semua. Dalam pemungutan suara atau pemeringkatan prioritas, dilakukan secara visual dengan menggunakan stiker atau symbol warna.

C. Kesetaraan

Semua peserta memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan berperan dalam musyawarah, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun fisik, dan memberikan penghargaan perbedaan pengalaman dan kapasitas individu. Contoh, Fasilitator menggunakan kartu atau simbol (misalnya bendera kecil) yang bisa diangkat oleh peserta jika mereka ingin berbicara, untuk memastikan semua mendapat kesempatan setara.

D. Tanpa Diskriminasi

Tidak ada pihak yang dikecualikan atau dihambat partisipasinya berdasarkan gender, usia, disabilitas, status sosial, atau identitas lainnya. Contoh, untuk peserta dengan hambatan komunikasi, disediakan pendamping, juru bahasa isyarat, atau teks tertulis. Fasilitator menghindari penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami dan menggunakan bahasa yang sederhana agar semua peserta dapat memahami informasi.

E. Akuntabel

Keputusan dan hasil musyawarah memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dievaluasi. Contoh, semua peserta diberi akses untuk mendapatkan laporan hasil Musik Keren atau Berita Acara Musik Keren.

F. Pemberdayaan

Musik Keren tidak hanya menjadi ruang konsultasi, tetapi juga menjadi sarana bagi kelompok rentan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menyampaikan aspirasi, memahami hak-hak mereka, dan terlibat aktif dalam pembangunan. Contoh, peserta mendapat penguatan kapasitas singkat tentang bagaimana mengisi format usulan. Format usulan dan perangkan usulan dibuat simple sehingga peserta dapat berpartisipasi secara bermakna. Fasilitator harus mendorong Masyarakat melakukan refleksi terhadap pembelajaran dari setiap proses Musik Keren.

G. Berkelanjutan

Proses Musrenbang Inklusif harus dirancang agar tidak hanya berlangsung satu kali, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Contoh, Fasilitator membentuk kelompok pemantau yang terdiri dari perwakilan kelompok rentan (perempuan, lansia, penyandang disabilitas, kelompok adat, dsb.) yang bertugas untuk mengawasi implementasi hasil musyawarah dan mengadvokasikan isu-isu yang belum tertangani.

V. MUSIK KEREN RPJMD



A. Persiapan

MUSIK KEREN RPJMD diawali dengan tahap persiapan.

1. Tahap persiapan meliputi :
 - a. pembentukan tim;
 - b. penyusunan jadwal kegiatan;
 - c. sosialisasi rancangan awal;
 - d. pemetaan peserta; dan
 - e. penguatan kapasitas.
2. Tim sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas Unsur Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Komunitas Rentan.
 - a. Tugas Tim adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD.
 - b. Tim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Peserta sebagaimana dimaksud dalam pemetaan peserta di atas terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Delegasi mewakili peserta Kabupaten/Kota;
 - d. Perwakilan Kelompok Rentan
 - e. Praktisi/Akademisi;
 - f. CSO/LSM/Ormas;

- g. Tokoh masyarakat;
- h. Tokoh Agama;
- i. unsur pengusaha/investor/filantropi; dan
- j. unsur lain yang dipandang perlu.

B. Pelaksanaan

1. Penyelenggara MUSIK KEREN RPJMD adalah Bapperida.
2. MUSIK KEREN RPJMD dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sebagai bagian dari tahapan penyusunan RPJMD.
3. Dalam hal terjadi Perubahan RPJMD, maka MUSIK KEREN RPJMD akan disesuaikan dengan perubahan tersebut.
 - a. Ruang lingkup Pembahasan MUSIK KEREN RPJMD adalah:
 - b. permasalahan dan isu strategis terkait Kelompok Rentan;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kelompok Rentan; dan
 - d. program pembangunan daerah yang Inklusif.
4. Mekanisme penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD diatur sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan MUSIK KEREN RPJMD; dan
 - b. penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD:
 - c. Pemaparan dan pembahasan materi materi dari para nara sumber;
 - d. Pembagian dan diskusi kelompok rentan;
 - e. Diskusi kelompok dipandu oleh fasilitator; dan
 - f. Pembagian kelompok diskusi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman.
5. Perumusan rancangan hasil MUSIK KEREN RPJMD dilakukan oleh Fasilitator dan Bapperida berdasarkan rangkuman hasil paparan dan tanggapan peserta MUSIK KEREN RPJMD.
6. Hasil MUSIK KEREN RPJMD dalam bentuk berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta.
7. Format berita acara tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

C. Pasca Musrenbang

1. Rekapitulasi hasil MUSIK KEREN RPJMD dirumuskan oleh Bapperida berdasarkan Isu, Kewenangan, prioritas daerah, urusan bidang pemerintahan, perangkat daerah.
2. Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Provinsi dibawa dan dibahas bersama dalam Tahapan Penyusunan RPJMD.
3. Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Hasil Rumusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat akan sampaikan kepada Pemerintah Pusat.

VI. MUSIK KEREN RKPD



A. Persiapan

1. MUSIK KEREN RKPD diawali dengan tahap persiapan.
2. Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan tim;
 - b. penyusunan jadwal kegiatan;
 - c. sosialisasi rancangan awal;
 - d. pemetaan peserta; dan
 - e. penguatan kapasitas.
3. Tim di atas terdiri atas Unsur Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Komunitas Rentan.
4. Tugas Tim sebagaimana dimaksud di atas adalah mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan MUSIK KEREN RKPD.
5. Susunan keanggotaan dan tugas Tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
6. Peserta MUSIK KEREN RKPD terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. Delegasi mewakili peserta Kabupaten/Kota;
 - d. Perwakilan Kelompok Rentan;
 - e. Praktisi/Akademisi;
 - f. CSO/LSM/Ormas;
 - g. Tokoh masyarakat;

- h. Tokoh Agama;
- i. unsur pengusaha/investor/filantropi; dan
- j. unsur lain yang dipandang perlu.

B. Pelaksanaan

1. Penyelenggara MUSIK KEREN adalah Bapperida.
2. MUSIK KEREN RKPD dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian dari tahapan penyusunan RKPD.
3. Ruang lingkup pembahasan MUSIK KEREN RKPD adalah:
 - a. permasalahan dan isu strategis terkait Kelompok Rentan;
 - b. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kelompok Rentan;
 - c. program pembangunan daerah yang Inklusif;
 - d. kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang inklusif serta penentuan sasaran dan lokasi.
4. Mekanisme penyelenggaraan MUSIK KEREN RKPD, diatur sebagai berikut:
 - a. acara pembukaan MUSIK KEREN RKPD; dan
 - b. penyelenggaraan MUSIK KEREN RKPD:
 - c. pemaparan dan pembahasan materi dari para nara sumber;
 - d. pembagian dan diskusi Kelompok Rentan;
 - e. diskusi kelompok dipandu oleh Fasilitator; dan
 - f. pembagian kelompok diskusi akan diatur lebih lanjut dalam pedoman.
5. Perumusan rancangan hasil MUSIK KEREN RKPD dilakukan oleh Fasilitator dan Bapperida berdasarkan rangkuman hasil paparan dan tanggapan peserta MUSIK KEREN RKPD.
6. Hasil MUSIK KEREN RKPD dalam bentuk berita acara yang ditandatangani perwakilan peserta.
7. Format berita acara terlampir.

C. Pasca Musrenbang

1. Rekapitulasi hasil MUSIK KEREN RKPD dirumuskan oleh Bapperida berdasarkan isu, kewenangan, prioritas daerah, urusan bidang pemerintahan, perangkat daerah.
2. Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Provinsi dibawa dan dibahas bersama dalam tahapan penyusunan RKPD.
3. Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota akan sampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Hasil rumusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat akan sampaikan kepada Pemerintah Pusat;

D. Fasilitas MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD

1. Fasilitas untuk pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD harus aksesibel bagi semua peserta.
2. Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta.

E. Pemantauan dan Pengawasan

1. Gubernur melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD dengan cara :
 - a. memantau dan mengawasi tahapan dan jadwal MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap berita acara pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD; dan
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD.
4. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan MUSIK KEREN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Perangkat Daerah terkait, Gubernur melakukan pembinaan dan pendampingan.
5. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan inklusi di Kabupaten/Kota.

VII. PANDUAN TAMBAHAN



A. Pengantar

Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (Musik Keren) merupakan pendekatan partisipatif yang bertujuan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi kelompok rentan—seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok minoritas—terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memberikan kerangka dasar untuk pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat aspek-aspek sejumlah teknis dan prosedural yang memerlukan penjelasan lebih lanjut agar implementasinya benar-benar inklusif dan efektif.

Pemerintah Provinsi NTT bersama dengan OMS, dengan dukungan SKALA, melaksanakan simulasi Musrenbang Inklusif pada awal Maret 2025 dalam workshop penguatan kapasitas Jaringan Masyarakat Sipil dan Fasilitator untuk persiapan Musik Keren. Berdasarkan pembelajaran dari simulasi tersebut, bab ini menyajikan penjelasan tambahan untuk Musik Keren. Panduan tambahan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan arahan yang lebih jelas bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan Musik Keren.

B. Pembagian Peran

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) sangat penting dalam mewujudkan Musrenbang yang inklusif. Stakeholder yang terlibat mencakup:

- Pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang bertanggung jawab menyediakan kerangka regulasi dan sumber daya untuk mendukung Musrenbang inklusif. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mendukung partisipasi kelompok rentan melalui penyediaan anggaran dan fasilitas yang aksesibel.
- Masyarakat sipil, yang memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Mereka berfungsi sebagai pendamping bagi kelompok rentan memperjuangkan hak-hak mereka, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusivitas dalam perencanaan pembangunan.
- Organisasi Non-Pemerintah (NGO), yang dapat mendukung peningkatan kapasitas kelompok rentan melalui pelatihan, forum diskusi, pendampingan penyusunan usulan, dan dukungan teknis lainnya agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam Musrenbang termasuk mengkawal proses pasca Musik Keren bersama masyarakat sipil dan kelompok rentan.
- Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya berpartisipasi aktif dalam MUSIK KEREN dan terus mengkawal untuk memastikan proses-proses pasca MUSIK KEREN.

C. Peserta

Peserta Musik Keren terdiri dari:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur;
- c. Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi;
- d. Unsur Pemerintah Pusat;
- e. Bappeda dan Perangkat Daerah provinsi;
- f. Delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan;
- g. Perwakilan Kelompok perempuan
- h. Perwakilan Kelompok anak
- i. Perwakilan Kelompok Penyandang Disabilitas (tuna rungu/tuna wicara/tuna daksa/tuna netra/dll)
- j. Perwakilan Kelompok Rentan/Marginal lainnya
- k. Praktisi/Akademisi;
- l. CSO/LSM/Ormas;
- m. Tokoh masyarakat;
- n. unsur pengusaha/investor/filantropi;
- o. serta unsur lain yang dipandang perlu.

D. Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD Provinsi, pejabat dari Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, dan pejabat Perangkat Daerah Provinsi atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang inklusi.

E. Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang inklusi. Fasilitator berasal dari pemerintah daerah (ASN) dan Organisasi Masyarakat Sipil. Syarat dari Fasilitator adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Teknis:
 - Pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah,
 - Pengetahuan tentang GEDSI
 - Kemampuan Analisis dan Dokumentasi Usulan sesuai tingkat kewenangan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, desa)
 - Kemampuan Menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
 - Mampu memetakan kebutuhan layanan dasar dan menghubungkannya dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal).
2. Kompetensi Fasilitasi dan Komunikasi
 - Terampil dalam memfasilitasi Focus Group Discussion (FGD) dan metode diskusi yang inklusif (misalnya, bahasa isyarat untuk disabilitas, format sederhana untuk lansia, tidak bias gender, dll).
 - Kemampuan menciptakan ruang aman bagi kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi mereka.
 - Kemampuan Berkomunikasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan (pemerintah, kelompok rentan, dll)
3. Tugas dari Fasilitator:
 - a. Diskusi Kelompok Tematik
 - Meninjau daftar usulan dari kelompok rentan sebelum diskusi dimulai.
 - Membagi peserta dalam kelompok tematik (Sosial Budaya, Ekonomi, Infrastruktur, dll.).
 - Memfasilitasi diskusi untuk mengonfirmasi dan menambah usulan.
 - Mengarahkan notulen dalam pencatatan semua usulan dan hasil diskusi.
 - b. Pengesahan Berita Acara
 - Membacakan berita acara kepada peserta untuk mendapatkan masukan dan koreksi.
 - Memastikan berita acara final disetujui dan ditandatangani oleh ASN Bappeda, perwakilan kelompok rentan, dan organisasi masyarakat sipil.
 - Menyerahkan berita acara kepada Bappeda Provinsi untuk dibawa ke Musrenbang reguler.
 - c. Rencana Tindak Lanjut
 - Memfasilitasi pemilihan delegasi perempuan, penyandang disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya untuk Musrenbang Reguler Provinsi.
 - d. Pasca MUSIK KEREN
 - Membantu Tim Kecil (Pokja) dalam mengompilasi, merapikan, dan menyelaraskan hasil MUSIK KEREN.
 - Memberikan arahan kepada delegasi yang akan mengikuti Musrenbang reguler terkait strategi penyampaian usulan.

F. Notulen

1. Notulen adalah individu yang bertanggung jawab mendokumentasikan seluruh proses Musrenbang Inklusif, mulai dari diskusi kelompok tematik hingga tindak lanjut pasca kegiatan, dengan memastikan seluruh suara, usulan, dan keputusan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, anak, lansia, dan kelompok minoritas lainnya) tercatat secara akurat, terverifikasi, dan dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah yang responsif GEDSI.
2. Tugas Notulen:
 - a. Tugas Notulen Desk:
 - I. Diskusi Kelompok Tematik
 - Menyiapkan daftar usulan yang sudah masuk sebelumnya.
 - Mencatat tambahan usulan yang masuk dalam diskusi kelompok tematik (Desk).
 - Mengkoordinasikan pencatatan dengan fasilitator agar seluruh poin diskusi terdokumentasi dengan jelas.
 - II. Pengesahan Berita Acara
 - Membantu fasilitator menyusun berita acara berdasarkan hasil diskusi yang telah difasilitasi.
 - Mencatat masukan dan koreksi dari peserta setelah berita acara dibacakan oleh fasilitator.
 - Menyunting dan menyesuaikan berita acara agar sesuai dengan masukan peserta sebelum finalisasi.
 - Mendokumentasikan tanda tangan persetujuan dari ASN Bappeda, perwakilan kelompok rentan, dan organisasi masyarakat sipil.
 - Menyiapkan berita acara final untuk diserahkan ke Bappeda Provinsi.
 - III. Rencana Tindak Lanjut
 - Mencatat proses pemilihan delegasi dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.
 - Mendokumentasikan daftar nama delegasi terpilih beserta keterangan singkat mengenai keterwakilannya.
 - IV. Pasca MUSIK KEREN
 - Membantu Tim Kecil (Pokja) dalam mengompilasi hasil diskusi, menyusun daftar isu utama, dan menyelaraskannya.
 - Mendukung penyusunan Policy Brief dengan merangkum temuan utama dan rekomendasi kebijakan.
 - Mengarsipkan semua dokumen hasil MUSIK KEREN untuk keperluan advokasi lebih lanjut.

G. Tempat dan Waktu Penyelenggaraan

1. Tempat

Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan harus dilaksanakan di tempat yang aksesibel, mempertimbangkan kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Pilihan tempat dapat berupa:

 - Gedung Pemerintah (Bappeda, aula kantor gubernur) yang memiliki fasilitas aksesibilitas.
 - Balai Pertemuan Komunitas yang mudah dijangkau kelompok rentan.

- Platform Digital (untuk sesi daring/hybrid) yang mendukung partisipasi inklusif.
2. Waktu Pelaksanaan
Musrenbang inklusif Kelompok Rentan dilaksanakan sebelum dilaksanakan Renja Perangkat Daerah dan Musrenbang reguler sebagai sesi pra-Musrenbang untuk menyusun rekomendasi yang akan diintegrasikan dalam Musrenbang tingkat provinsi. Penentuan waktu tersebut dimaksudkan agar usulan sudah teridentifikasi untuk mendukung prioritas daerah atau nasional serta kewenangan dan urusan dalam tata kelola perencanaan dan penganggaran daerah. Durasi penyelenggaraan Musrenbang Inklusif dilaksanakan sekurang-kurangnya 1-2 hari untuk memastikan diskusi mendalam dan pengolahan hasil yang baik.

H. Kelembagaan: Kelompok Kerja Musik Keren

1. Pengertian
Adalah tim yang bertanggung jawab dalam memastikan partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah yang inklusif, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga integrasi hasil ke dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Keanggotaan
 - a. Bapperida 5 bidang
 - b. Badan Pendapatan Daerah
 - c. Badan Keuangan
 - d. Inspektorat
 - e. OMS/Akademisi
3. Tanggung Jawab

I. Koordinator Tim

- Memimpin koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Musik Keren.
- Mengarahkan tim dalam memastikan pendekatan inklusif dalam perencanaan dan penganggaran.
- Berkomunikasi dengan pimpinan daerah terkait kebijakan dan strategi inklusi kelompok rentan dalam Musrenbang.
- Mengawal hasil Musik Keren agar diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD, Renja OPD).

II. Divisi Perencanaan dan Integrasi Dokumen

- Menyusun panduan teknis pelaksanaan Musik Keren.
- Mengidentifikasi isu-isu prioritas kelompok rentan dalam sektor layanan dasar, ekonomi, sosial, dan infrastruktur.
- Memastikan hasil diskusi Musik Keren terdokumentasi dengan baik dan diintegrasikan dalam perencanaan daerah.
- Mengkoordinasikan harmonisasi kebijakan inklusif dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

III. Divisi Pelibatan Masyarakat dan Fasilitasi Partisipasi

- Mengidentifikasi dan memastikan keterlibatan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, kelompok adat, dll.).
- Menyediakan mekanisme dan alat bantu yang memastikan aksesibilitas dan partisipasi penuh kelompok rentan.
- Memfasilitasi forum diskusi dan aspirasi kelompok rentan sebelum dan selama Musrenbang Inklusif.

- Menyusun strategi advokasi agar usulan kelompok rentan diterima dalam kebijakan daerah.

IV. Divisi Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Implementasi

- Menyusun indikator keberhasilan dan mekanisme pemantauan hasil Musrenbang Inklusif.
- Melakukan analisis terhadap efektivitas integrasi isu kelompok rentan dalam kebijakan dan anggaran daerah.
- Mengawal implementasi hasil Musrenbang Inklusif dalam program dan kegiatan OPD.
- Melaporkan hasil pemantauan dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk Musrenbang di tahun berikutnya.

V. Divisi Data dan Dokumentasi

- Mengumpulkan dan menganalisis data terpilah kelompok rentan sebagai dasar penyusunan kebijakan.
- Menyusun profil kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Mendokumentasikan seluruh proses Musrenbang Inklusif, termasuk berita acara, daftar hadir, dan rekomendasi kebijakan.
- Memastikan keterbukaan data terkait hasil Musrenbang Inklusif agar dapat diakses oleh publik dan stakeholder terkait.

I. Metodologi Penyelenggaraan Musik Keren

Pelaksanaan Musrenbang yang inklusif memerlukan langkah-langkah metodologis yang sistematis dan terencana untuk memastikan partisipasi semua pihak, terutama kelompok rentan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam menjalankan Musrenbang inklusif:

1. **Pengorganisasian Peserta:** Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengundang semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pastikan bahwa undangan disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan dalam berbagai format dapat meningkatkan partisipasi. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan komunitas untuk mengetahui siapa saja yang perlu dilibatkan.
2. **Penyediaan Aksesibilitas:** Tempat pelaksanaan Musrenbang harus ramah bagi semua peserta. Ini mencakup penyediaan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti tempat duduk yang sesuai dan aksesibilitas transportasi. Informasi tentang lokasi dan waktu harus disampaikan secara jelas dan dapat diakses oleh semua pihak.
3. **Teknik Fasilitasi:** Fasilitator yang berpengalaman harus dipilih untuk memimpin pertemuan. Fasilitator harus mampu menciptakan suasana yang inklusif dan mendukung, di mana semua peserta merasa nyaman untuk berbicara dan menyampaikan pendapat. Penggunaan teknik seperti diskusi kelompok kecil, permainan peran, dan teknik pemungutan suara dapat meningkatkan keterlibatan peserta.
4. **Pengumpulan Masukan:** Selama Musrenbang, penting untuk menggunakan berbagai metode pengumpulan masukan, seperti kuesioner, forum diskusi, dan penggunaan teknologi digital. Misalnya, aplikasi mobile dapat digunakan untuk memungkinkan peserta memberikan masukan secara anonim, yang dapat membantu mengungkapkan pendapat dari mereka yang mungkin ragu untuk berbicara di depan umum.

5. **Pencatatan dan Tindak Lanjut:** Semua masukan yang diperoleh selama Musrenbang harus dicatat dengan baik dan dipastikan bahwa masukan tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan. Tindak lanjut setelah Musrenbang juga penting untuk menjaga akuntabilitas, seperti menyampaikan hasil dan keputusan kepada semua peserta.

J. Tahapan Implementasi Musik Keren

1. Persiapan

1.1. Persiapan Pokok

- a. Penyusunan Jadwal Kegiatan
 - Sesuaikan dengan siklus perencanaan daerah.
 - Pastikan terintegrasi dalam agenda Musrenbang reguler.
- b. Sosialisasi MUSIK KEREN;
 - Sosialisasikan semua pihak tentang waktu, tujuan dan manfaat MUSIK KEREN.
 - Gunakan materi yang mudah dipahami dan aksesibel.
- c. Pemetaan Peserta;
 - Identifikasi peserta kelompok rentan (disabilitas, lansia, perempuan, anak).
 - Siapkan fasilitas agar kelompok rentan bisa berpartisipasi dengan nyaman.
- d. Penguatan Kapasitas
 - Mempersiapkan peserta agar paham proses Musrenbang dan cara menyampaikan aspirasi.
 - Memberi pembekalan untuk fasilitator dan pendamping agar inklusif

1.2. Persiapan Teknis administrasi:

- a. Identifikasi Peserta - Pastikan keterlibatan kelompok rentan (perempuan, disabilitas, anak, lansia dan kelompok rentan yang lainnya). Panitia berkoordinasi dengan OMS Kelompok Rentan untuk mendapatkan input terkait kepesertaan.
- b. Pilih Lokasi - Menentukan tempat yang mudah dijangkau dan aksesibel bagi perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan;
- c. Tentukan Waktu Pelaksanaan- dengan mempertimbangkan peluang kehadiran peserta, terutama perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
- d. Sebarkan informasi - Gunakan undangan dan media yang mudah diakses untuk memastikan partisipasi luas; pastikan keterwakilan peserta berdasarkan distribusi gender, usia, disabilitas, desa/kota, dst.
- e. Sebarkan dan perkenalkan formulir usulan kepada kelompok rentan dan pendamping sebagai langkah awal pengumpulan aspirasi.
- f. Mengirimkan dan memperkenalkan formulir usulan kepada kelompok rentan dan organisasi masyarakat sipil pendamping sebagai persiapan awal pemberian usulan.
- g. Mengundang JBI (Juru Bahasa Isyarat)
- h. Siapkan Administrasi dan kebutuhan tambahan lainnya– memastikan semua dokumen dan kebutuhan teknis tersedia sebelum acara seperti:
 - Daftar Hadir,
 - Formulir-formulir : daftar Usulan, form analisis Gender analisis pathway/ APKM (untuk tim Pokja), Berita Acara, dll.
 - ATK seperti spidol, kertas plano, metaplan, lakban kertas, dll.

1.3. Persiapan Substansi

- a. Tentukan Isu Strategis – pilih topik utama seperti: dibahas dalam Musrenbang Inklusi, seperti: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur, Tata Kelola dan Perlindungan Sosial.
- b. Siapkan Data – Gunakan sumber resmi seperti data BPS, DT SEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional), bisa juga foto, dll.
- c. Siapkan Formulir Usulan – kirimkan ke kelompok rentan dan pendamping untuk mempersiapkan aspirasi kelompok rentan.
- d. Pembekalan Fasilitator – khususnya untuk memahami isu, metode analisis, program/urusan tematik, dan fasilitasi yang inklusif serta responsif gender. Fasilitator dapat disiapkan melalui pelatihan atau briefing singkat.
- e. Susun Draft Usulan – Kumpul dan daftar usulan tematik yang sudah masuk melalui platform daring.

2. Pelaksanaan

Agenda Pelaksanaan Musik Keren terdiri dari:

- a. Persiapan Acara
- b. Pembukaan Acara
- c. Pemaparan Materi presentasi (disesuaikan dengan kondisi)
- d. Diskusi Dan Konsultasi (disesuaikan dengan kondisi)
- e. Penyusunan Aspirasi dan Usulan
- f. Penyampaian Hasil Diskusi
- g. Berita Acara
- h. Rencana Tindak Lanjut (diatur oleh Panitia)
- i. Penutupan acara
- j. Dokumentasi/Foto Bersama

MUSIK KEREN dilaksanakan selama 1-2 hari penuh dengan rincian acara sebagai berikut:

1. Persiapan Acara

a. Aksesibilitas Lokasi

- Pilih tempat yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan.
- Pastikan ada jalur bebas hambatan, pintu cukup lebar, serta meja registrasi yang mudah dijangkau.

b. Pengaturan Tempat Duduk

- Sediakan area khusus untuk penyandang disabilitas, lansia, dan pendamping anak.
- Pastikan ada ruang bagi pengguna kursi roda dan kursi dengan sandaran bagi lansia.

c. Fasilitas Pendukung

- Toilet aksesibel, ruang laktasi, dan area istirahat yang nyaman.
- Jika memungkinkan, siapkan tenaga medis atau ambulans.

d. Aksesibilitas Komunikasi

- Sediakan juru bahasa isyarat dan mikrofon dengan suara jelas.
- Gunakan materi dalam format aksesibel (huruf besar, digital dengan pembaca layar).

- Gunakan bahasa sederhana dan metode interaktif bagi anak-anak.
- e. **Keamanan dan Kenyamanan**
 - Siapkan pendamping bagi kelompok rentan dan rambu petunjuk yang jelas.
 - Pastikan jalur evakuasi aman dan hindari material yang berisiko kesehatan.
 - f. **Partisipasi Inklusif**
 - Gunakan metode yang memungkinkan semua peserta berbicara, seperti FGD atau alat bantu visual.
 - g. **Pendaftaran**
 - Penyelenggara menyediakan absensi responsif GEDSI (lihat formulir daftar hadir).
 - Penyelenggara menyediakan juru bahasa isyarat di front desk untuk membantu penyandang disabilitas tuli.
 - Peserta memilih desk tematik dalam Musik Keren.
2. **Pembukaan Acara.** Acara dibuka oleh Gubernur atau yang mewakili dengan penerjemah Juru Bahasa Isyarat (JBI).
 3. **Pemaparan Materi Presentasi.** Narasumber yang diharapkan misalnya antara lain:
 - Bappenas: Arah Kebijakan Pembangunan Responsif Gender Inklusif.
 - Kemendagri: Pedoman Umum Penyusunan RKPD dan APBD yang Responsif Gender dan Inklusif.
 - Bappeda NTT: Potret , Arah Kebijakan serta Pencapaian PUG, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di NTT.
 - Sektor Swasta & Organisasi Perempuan/OPDis: Peran Perempuan dan atau Penyandang Disabilitas, atau Kelompok Rentan lainnya dalam Pembangunan Daerah.
 4. **Diskusi Kelompok Tematik**

Sebelum diskusi, fasilitator **MUSIK KEREN** memeriksa daftar usulan kelompok rentan. Jika usulan belum lengkap, dilakukan penggalian gagasan lebih lanjut.

Langkah-langkah:

 - a. Peserta dibagi dalam kelompok tematik (Sosial Budaya, Ekonomi, Infrastruktur, dll.).
 - b. Fasilitator menyampaikan daftar usulan yang sudah masuk.
 - c. Peserta mencermati, mengonfirmasi, dan menambahkan usulan jika diperlukan.
 - d. Fasilitator memandu pendaftaran usulan baru dari kelompok rentan.
 - e. Notulen mencatat semua usulan.
 - f. Fasilitator memandu perangkan usulan (lihat Formulir Perangkan).
 5. **Pengesahan Berita Acara (Rujukan pada Pergub dengan Penyesuaian masing-masing Kelompok- min 4-5 Berita Acara)**
 - a. Berita Acara dibacakan oleh Fasilitator untuk mendapat review dari peserta.
 - b. Peserta diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau koreksi jika ada hal yang kurang tepat atau perlu ditambahkan.
 - c. Jika diperlukan, dilakukan perbaikan terakhir sebelum berita acara difinalisasi.
 - d. ASN Bappeda, perwakilan kelompok rentan, dan organisasi masyarakat sipil (OMS) menandatangani berita acara sebagai bukti kesepakatan bersama.
 - e. Berita Acara secara resmi diserahkan kepada perwakilan Bappeda Provinsi untuk dibawa ke Musrenbang reguler
 - f. Output: Berita Acara MUSIK KEREN telah ditandatangani.

Yang perlu disiapkan:

- Format Berita Acara berdasarkan Pergub
- Lampiran Berita Acara: Daftar Hadir Kelompok (Peserta dan Fasilitator)
- Lampiran : Daftar Usulan Prioritas yang telah disepakati
- Tagging kewenangan (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa).

6. Rencana Tindak Lanjut

- Fasilitator memfasilitasi pemilihan delegasi peserta dari perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya untuk mengikuti Musrenbang Provinsi yang regular.
- Fasilitator membentuk Tim Kecil (Pokja) untuk menyelaraskan hasil-hasil Musrenbang Inklusif. Tim Kecil terdiri dari Perwakilan Bappeda, Organisasi Perempuan, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), dan Perwakilan Anak & Lansia.

7. Penutupan Acara

8. Dokumentasi/Foto Bersama

Seluruh proses pelaksanaan Musrenbang Inklusif diterjemahkan oleh Juru Bahasa Isyarat (JBI), baik saat Pleno maupun Diskusi Kelompok.

3. Pasca Kegiatan Musrenbang Inklusif

- a. Tim Kecil (Pokja) mengkompilasi, merapikan dan menyelaraskan hasil MUSIK KEREN (hasil-hasil Diskusi Tematik GEDSI).
- b. Tim Kecil menyusun Policy Brief yang dikemas menjadi usulan atau masukkan dalam penyusunan RKPD atau RKPD-Perubahan pada Musrenbang Provinsi.
- c. Tim Kecil memberikan arahan (Briefing) kepada calon delegasi yang terpilih dalam Musrenbang Tematik (inklusif) untuk persiapan mengikuti Musrenbang Provinsi/Kabupaten/Kota Regular. Salah satu muatan briefing adalah strategi menyampaikan usulan dan mengawal hasil Musrenbang Tematik (Inklusif) agar diakomodasi dalam RKPD dan APBD tahun berjalan atau RKPD dan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

4. Tahap Lanjutan (Tahap Advokasi)

- a. Tim Kecil melakukan komunikasi secara intensif dengan Perangkat Daerah Terkait dengan isu-isu tematik GEDSI dan hasil-hasil Musrenbang Inklusif untuk disinergikan dengan Renja-Perangkat Daerah.
- b. Tim Kecil melakukan komunikasi secara intensif dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait hasil-hasil Musrenbang Inklusif.
- c. Tim Kecil membuat MoU dengan TAPD dan Banggar DPRD untuk menyepakati hasil-hasil Musrenbang Inklusif diakomodir dalam RKPD dan APBD tahun berjalan atau RKPD dan APBD Tahun anggaran Berikutnya.

5. Tahap Pemantauan dan Pengawasan

- a. Gubernur melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD dengan cara : memantau dan mengawasi tahapan dan jadwal MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD;
 - menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap berita acara pelaksanaan MUSIK KEREN RPJMD dan RKPD; dan
 - mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan MUSIK KEREN

RPJMD dan RKPD.

- b. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan MUSIK KEREN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Perangkat Daerah terkait, Gubernur melakukan pembinaan dan pendampingan.
- c. Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas kualitas pelaksanaan musyawarah pembangunan inklusi di Kabupaten/Kota.

VIII. Formulir-formulir



1. Daftar Hadir Pendaftaran

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)	Disabilitas (Fisik/ Seksorik/ Intelektual/ Mental/Ganda)	Organisasi	Tanda Tangan

2. Daftar Usulan Kelompok Rentan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	Bidang	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Permasalahan	Usulan	Kelompok Sasaran	Volume

Keterangan Kolom:

- Kolom 2. Bidang usulan: 1.Pendidikan, 2.Kesehatan, 3.Ekonomi, Sosial dan Perlindungan Sosial, 4.Infrastruktur, Tata kelola, 5.GBV dan Tema lainnya.
- Kolom 3. Kabupaten: Nama Kabupaten yang lebih spesifik sebagai lokasi pengusul atau penerima manfaat
- Kolom 4. Kecamatan: Nama Kecamatan yang lebih spesifik sebagai lokasi pengusul atau penerima manfaat
- Kolom 5. Desa: Nama Desa yang lebih spesifik sebagai lokasi pengusul atau penerima manfaat
- Kolom Permasalahan: Kondisi atau hambatan yang dihadapi kelompok sasaran yang melatarbelakangi usulan. Contoh: Penyandang disabilitas tidak memiliki alat bantu untuk aktifitas harian di rumah, sekolah dan tempat kerja
- Kolom Usulan: Bentuk solusi atau kebutuhan yang diajukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Contoh: Pengadaan alat alat bantu dengar (hearing aid), tongkat sensorik, dll
- Kolom Kelompok Sasaran: Kelompok penerima manfaat utama dari usulan. Contoh: anak disabilitas, perempuan kepala keluarga, lansia produktif, dsb
- Kolom Volume: Jumlah atau satuan kebutuhan yang diusulkan. Misalnya 10 unit, 5 paket, 3 kelas/30 peserta, 5 set, 10 aplikasi, dsb

3. Formulir Penentuan Prioritas

No	Usulan	Kriteria			Jumlah Nilai	Peringkat
		Mendukung pada pencapaian target prioritas Pembangunan Provinsi	Mendukung pada pemenuhan hak dasar rakyat provinsi	mendukung pada nilai tambah pendapatan		

Keterangan:

1. Kriteria penilaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan provinsi, dan sebaiknya sudah disepakati sebelum pelaksanaan Musik Keren
2. Langkah penggunaan matriks diatas ;
Penilaian menggunakan skor. Skor yang disarankan adalah 1-5 dengan standar penilaian; 1 = sangat kurang; 2 = kurang; 3 = cukup; 4 = baik; 5 = sangat baik
Kolom 1. (No) diisi dengan angka sesuai urutan
Kolom 2. (Usulan) diisi dengan semua usulan yang akan diberikan perankingan/ atau diprioritaskan
Kolom 3. (Kriteria) diisi dengan keterangan kriteria, dimana setiap usulan akan diberikan skor sesuai dengan masing-masing kriteria
Kolom 4. (Jumlah Nilai) diisi dengan hasil penjumlahan total dari ketiga kriteria
Kolom 5. (Peringkat) diisi dengan nomor urut dari jumlah nilai, dimulai dari yang terbesar hingga yang terkecil

Catatan:

Penilaian (skoring) terhadap usulan-usulan dilakukan satu persatu secara berurutan, jumlah nilai dan peringkat dilengkapi di akhir setelah semua usulan mendapatkan skor di ketiga kolom kriteria. Dengan cara ini diharapkan dapat menghindari upaya pihak-pihak tertentu dalam musyawarah untuk menyasiasi usulan yg akan diprioritaskan dengan berusaha menambah jumlah skor untuk bisa melampaui skor usulan diatasnya jika jumlahnya sudah diketahui lebih dulu.

Jika terdapat usulan yang total skornya sama, maka kesepakatan dapat ditentukan melalui musyawarah mufakat atau bisa menggunakan cara voting/ pemungutan suara untuk menetapkan urutan

3. Penggunaan matriks ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan musyawarah khusus, baik digunakan di masing-masing kelompok (perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya) atau menggunakan ranking (pemeringkatan) satu kali untuk semua usulan dari kelompok khusus secara acak.

4. Berita Acara

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG INKLUSI KELOMPOK RENTAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RPJMD
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN -**

Pada hari Tanggal, sampai dengan tanggal Bulan Tahun bertempat di, telah diselenggarakan Musrenbang inklusi tingkat Provinsi untuk membahas isu tematik: _____ yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar peserta hadir peserta dalam lampiran I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan Musrenbang inklusi tingkat Provinsi

2. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan Saran dari seluruh peserta Musrenbang inklusi Kelompok Rentan RPJMD tingkat Provinsi terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi yang dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang inklusi tingkat Provinsi, maka pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Seluruh peserta Musrenbang inklusi Tingkat Provinsi

MENYEPAKATI

- a. Permasalahan dan Isu Kelompok Rentan serta Usulan dari Kelompok Rentan Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini.
- b. Rumusan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang Inklusi Kelompok Rentan Tahun untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun..... -

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya
, tanggal

Pejabat...
 Selaku pimpinan sidang Musrenbang inklusi
 Provinsi NTT

Tanda Tangan
 (Nama)

Mewakili peserta Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan Tingkat Provinsi

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
dst				

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

Format Lampiran I. Berita Acara Daftar Hadir

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Usia (Tahun)	Disabilitas (Fisik/ Seksorik/ Intelektual/ Mental/Ganda)	Organisasi	Tanda Tangan

Format Lampiran II. Berita Acara

Isu Tematik: _____

No	Kelompok Rentan	Permasalahan	Usulan	Lokasi

Format Lampiran II. Program Prioritas Kepala Daerah NTT 2025-2030



XI. PENGENALAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 90/2019 DAN SIPD



A. Pengantar dan Tujuan

Usulan kegiatan untuk penanganan kelompok rentan melalui Musik Keren, pada dasarnya harus disesuaikan dengan struktur program dan penganggaran yang digunakan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Permendagri 90/2019 dan turunannya, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Karena itu Kelompok Rentan dan OMS yang mendampingi kelompok rentan perlu memahami dengan baik struktur program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggarnya, sehingga usulan yang disampaikan sejalan dengan pengaturan dari sisi perencanaan dan penganggaran.

Peserta dari Kelompok Rentan dan OMS pendamping perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, sehingga dapat mememanfaatkannya dalam merumuskan usul/saran penanganan berbagai masalah kelompok rentan. Setelah mempelajari modul ini, peserta (OMS) memiliki kemampuan teknis untuk:

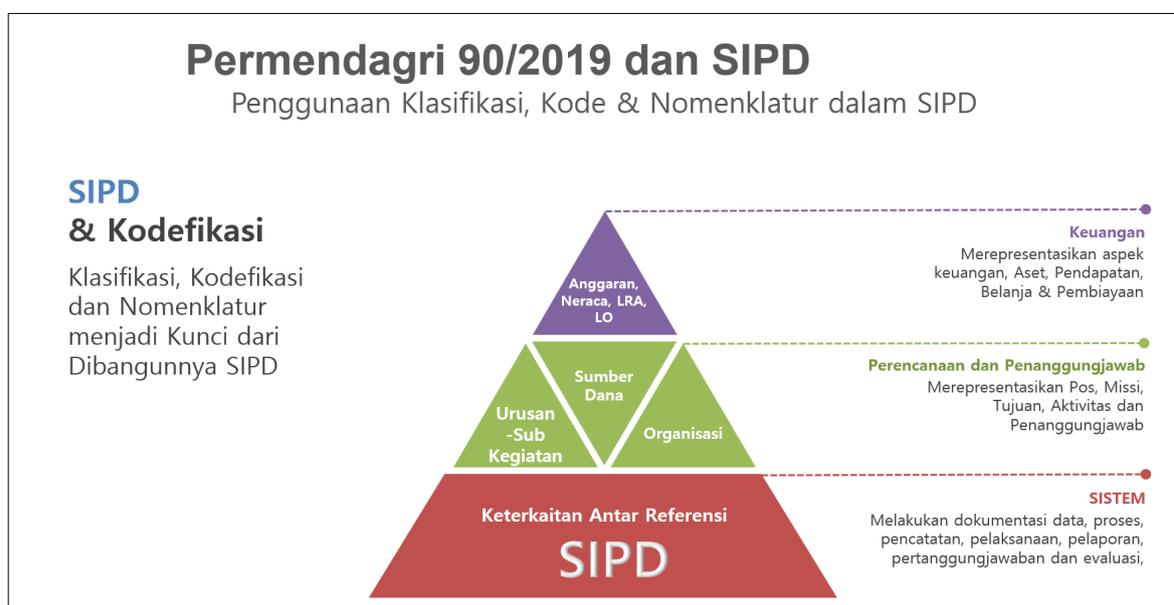
1. Mengklasifikasi berbagai permasalahan dan tindakan penanganan kelompok rentan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan daerah; dan
2. Merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan penanganan permasalahan kelompok rentan dengan menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

B. SIPD dan Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur

Pengertian:

1. SIPD adalah singkatan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yaitu sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SIPD juga berfungsi untuk menyatukan referensi nasional, sehingga data pembangunan dan keuangan nasional dan daerah dapat terintegrasi.
2. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini hadir sebagai upaya untuk menertibkan dan menyeragamkan bahasa perencanaan dan penganggaran di seluruh daerah di Indonesia. Secara garis besar, Permendagri No. 90 Tahun 2019 mengatur tentang “Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah”. Artinya, peraturan ini menetapkan standar yang jelas dan terstruktur mengenai bagaimana setiap kegiatan pembangunan dan keuangan daerah diklasifikasikan, diberi kode, dan diberi nama.
3. Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis, dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

C. Keterikatan SIPD dan Permendagri No. 90 Tahun 2019



- SIPD merupakan platform yang digunakan untuk mengimplementasikan Permendagri 90 Tahun 2019.
- Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi dasar atau acuan dalam penginputan data di sistem SIPD.

D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur terdiri atas:

1. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan;
2. Fungsi;
3. Organisasi;
4. Sumber Pendanaan;
5. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan
6. Rekening

Dari keenam aspek tersebut, yang penting dipahami dengan baik oleh OMS adalah Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, karena hal ini berkaitan dengan tindak lanjut dari usulan penanganan kelompok rentan yang disampaikan OMS pada saat Musik Keren maupun Musrenbang Reguler.

E. Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Urusan untuk bidang urusan yang perlu diperhatikan OMS dalam Musik Keren adalah Urusan Pemerintahan Konkuren (urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, diberi Kode Angka 1 (satu);
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diberi Kode Angka 2 (dua);
3. Urusan Pilihan diberi Kode Angka 3 (tiga).

Pengaturan lebih lanjut Urusan Pemerintahan Konkuren tersebut adalah sebagai berikut.

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

- a. 1.01. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan (kecuali 1.1.07 – 1.1.08 Khusus Aceh.)
- b. 1.02. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 1.02.
- c. 1.03. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. 1.04. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- e. 1.05. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (kecuali 1.05.02.1.04 - .05.02.104.11 khusus Aceh)
- f. 1.06. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:

- a. 2.07. Urusan Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja
- b. 2.08. Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c. 2.09. Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan
- d. 2.10. Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan
- e. 2.11. Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup

- f. 2.12. Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- g. 2.13. Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- h. 2.14. Urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
- i. 2.15. Urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan
- j. 2.16. Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika
- k. Urusan Pemerintahan di Bidang Koperasi dan UMKN
- l. Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal
- m. Urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- n. Urusan Pemerintahan di Bidang Statistik
- o. Urusan Pemerintahan di Bidang Persandian
- p. Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan
- q. Urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan
- r. Urusan Pemerintahan di Bidang Kearsipan

19. Urusan Pilihan terdiri dari:

- a. Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan
- b. Urusan Pemerintahan di Bidang Pariwisata
- c. Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian
- d. Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan
- e. Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
- f. Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan
- g. Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian
- h. Urusan Pemerintahan di Bidang Transmigrasi

**CONTOH SUSUNAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR
URUSAN PEMERINTAHAN**

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	01				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN
1	01	02			PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kep.Sek/TU
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
1	01	02	1.01	05	dst

F. Contoh Usulan

Di bawah ini adalah contoh bagaimana memasukkan usulan kelompok rentan dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan Permedagri 90 Tahun 2019.

Studi Kasus 1. Usulan: Penyediaan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Penyandang Disabilitas Tuli.

1. Klasifikasi			
Klasifikasi	:	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	
	:	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	
Program	:	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
Kegiatan	:	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
Sub Kegiatan	:	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
2. Kodifikasi			
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2
	:	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	2.07
Program	:	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	2.07.03
Kegiatan	:	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01
Sub Kegiatan	:	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.2.01.01
3. Nomenklatur			
Nomenklatur yang digunakan	:	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
Deskripsi	:	Penyediaan pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas tuli, untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka.	
4. Penerapan Dalam Dokumen Daerah			
RPJMD/RKPD		<ul style="list-style-type: none"> Subkegiatan ini dimasukkan dalam dokumen RPJMD/RKPD dengan kode dan nomenklatur yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan, misalnya: "Jumlah penyandang disabilitas tuli yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja". 	
		<ul style="list-style-type: none"> Anggaran dialokasikan untuk subkegiatan ini dengan kode 2.07.03.2.01.01 Rincian anggaran mencakup biaya pelatihan, peralatan, dan honor instruktur dan Juru Bahasa Isyarat. 	
APBD		<ul style="list-style-type: none"> Anggaran dialokasikan untuk subkegiatan ini dengan kode 2.07.03.2.01.01 Rincian anggaran mencakup biaya pelatihan, peralatan, dan honor instruktur dan Juru Bahasa Isyarat. 	
SIPD		<ul style="list-style-type: none"> Seluruh data terkait subkegiatan ini diinput ke dalam SIPD sesuai dengan kode, nomenklatur, dan anggaran yang telah ditetapkan. 	

Tampilan Usulan dengan menggunakan kerangka Permendagri No 90 Tahun 2019:

2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unir Kompetensi
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi.

Studi Kasus 2. Usulan: Layanan jemput bola pencatatan sipil bagi penyandang disabilitas untuk kepemilikan dokumen kependudukan.

1. Klasifikasi			
Klasifikasi	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
Urusan Pemerintahan	:	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
Program	:	Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	
Kegiatan	:	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	
Sub Kegiatan	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
2. Kodifikasi			
Urusan Pemerintahan	:	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1
		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	1 06
Program	:	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 06 04
Kegiatan	:	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 06 04 2.01
Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	1 06 04 2.01 07
3. Nomenklatur			
Nomenklatur yang digunakan	:	1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	
Deskripsi	:		
4. Penerapan Dalam Dokumen Daerah			
RPJMD/RKPD		<ul style="list-style-type: none"> Subkegiatan ini dimasukkan dalam dokumen RPJMD/RKPD dengan kode dan nomenklatur yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan, misalnya: "Jumlah penyandang disabilitas tuli yang mengikuti pelatihan keterampilan kerja". 	

APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran dialokasikan untuk subkegiatan ini dengan kode 1 06 04 2.01 07
SIPD	<ul style="list-style-type: none"> • Rincian anggaran mencakup biaya • Seluruh data terkait subkegiatan ini diinput ke dalam SIPD sesuai dengan kode, nomenklatur, dan anggaran yang telah ditetapkan.

Tampilan Usulan dengan menggunakan kerangka Permendagri No 90 Tahun 2019:

1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	06				URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

X. PENUTUP



Panduan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan (Musik Keren) ini disusun sebagai referensi bagi para pemangku kepentingan dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Pembelajaran dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi dasar dalam merumuskan pendekatan yang dapat direplikasi dan disesuaikan di Kabupaten/Kota dan daerah lain sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Penyelenggaraan Musik Keren bukan hanya sekadar forum konsultasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan isu-isu Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui prinsip fasilitasi yang inklusif, pemetaan isu-isu prioritas, dan penggunaan mekanisme formal dalam sistem pemerintahan seperti Musrenbang dan SIPD, diharapkan kebijakan dan program pembangunan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.

Keberhasilan implementasi Musik Keren memerlukan komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, hingga masyarakat umum. Kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah akan menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para fasilitator, pengambil kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan praktik perencanaan pembangunan yang lebih inklusif. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pendekatan Musik Keren diharapkan terus dilakukan agar metode ini semakin efektif dan relevan dalam menjawab dinamika sosial dan tantangan pembangunan ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi langkah awal menuju perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.



Lampiran-Lampiran

Panduan Fasilitasi Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Lampiran I. Contoh Format Musik Keren

No	Kabupaten	Kecamatan	Kelompok Rentan	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Volume
1.	Timor Tengah Utara			25 anak penyandang disabilitas (tuli, daksa, Netra dan intelektual) mengalami kesulitan belajar karena ketiadaan alat bantu komunikasi belajar. (Bukan Data sebenarnya)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah untuk Penyandang (alat bantu dengar, alat bantu mobilitas dan alat bantu komunikasi) di Sekolah Dasar	Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu	25 orang
2.							
3.							

Lampiran II. Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Permendagri No. 90 Th 2019)

Contoh: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tingkat Provinsi. Informasi lengkap dapat diunduh di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139075/permendagri-no-90-tahun-2019> atau website resmi SIPD : <https://sipd.go.id/pemutakhiran/d5a165939bfe5a18d4ad2d5df35e193346df048b/>

JENIS PEMDA	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0010 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0011 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0013 Pembangunan Asrama Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0015 Pembangunan Fasilitas Parkir
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0016 Pembangunan Kantin Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0029 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/ Aula
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0037 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0040 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0041 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0043 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0055 Pemeliharaan Mebel
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0056 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0063 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0064 Penyediaan infrastruktur TIK

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0065 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0066 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0067 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0069 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0070 Pembangunan Ruang Laboratorium
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0071 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0073 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0074 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0076 Penataan Ruang/Sudut Baca
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0077 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0079 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.0080 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0007 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0008 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0011 Pembangunan Fasilitas Parkir
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0012 Pembangunan Kantin Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0018 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0019 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0029 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0032 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0033 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0048 Pemeliharaan Mebel
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0056 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0057 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0058 Penyediaan infrastruktur TIK
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0059 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0060 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0063 Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0065 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0066 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/ Aula
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0067 Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0068 Penataan Ruang/Sudut Baca
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0070 Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0071 Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0074 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0075 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0076 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0077 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0078 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.0079 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0006 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0009 Pembangunan Fasilitas Parkir
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0010 Pembangunan Kantin Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0012 Pembangunan Ruang Laboratorium

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0013 Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0014 Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0015 Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0016 Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0017 Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0028 Rehabilitasi Ruang Laboratorium
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0029 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0030 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0031 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0032 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0033 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0034 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0035 Pengadaan Mebel Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0036 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0037 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0038 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0039 Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0040 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0042 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0054 Pemeliharaan Mebel
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0056 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0057 Pengembangan konten digital untuk pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0062 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0063 Penyediaan infrastruktur TIK
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0064 Penataan Ruang/Sudut Baca
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0065 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0066 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0068 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0072 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0074 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0075 Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0077 Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0078 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/ Aula
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0079 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0081 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0082 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0083 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.0084 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.3.03.0061 Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.3.03.0062 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0001 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0002 Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0003 Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0004 Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0005 Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0006 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0007 Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0008 Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0009 Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0010 Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0012 Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0013 Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0014 Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0015 Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0016 Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0017 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0018 Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0019 Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0020 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0021 Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0022 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0023 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0024 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0025 Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0026 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0027 Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0028 Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0029 Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0030 Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0031 Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0035 Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0036 Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0037 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0038 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0039 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0040 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0041 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.3.04.0043 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	1.01.02.3.05.0001 Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	1.01.02.3.05.0002 Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	1.01.02.3.05.0003 Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	1.01.02.3.05.0004 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.3.06.0001 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.3.06.0002 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.3.06.0003 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.3.06.0004 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.3.06.0005 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.3.06.0006 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.3.06.0007 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.3.06.0008 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.07 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	1.01.02.3.07.0001 Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.07 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	1.01.02.3.07.0002 Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.3.08 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	1.01.02.3.08.0001 Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/ atau Pendidikan Kedinasan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.4.03.0061 Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.4.03.0062 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0001 Pembangunan Gedung Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0002 Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0003 Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0004 Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0005 Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0006 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0007 Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0008 Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0009 Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0010 Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0011 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0012 Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0013 Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0014 Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0015 Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0016 Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0017 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0018 Penyediaan Sarana Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0019 Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0020 Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0021 Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0022 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Akademi Komunitas

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0023 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0024 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0025 Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0026 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0027 Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0028 Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0029 Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa/i akademi komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0030 Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0031 Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0035 Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0036 Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0037 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0038 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0039 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0040 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0041 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0042 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.04 Pengelolaan Akademi Komunitas	1.01.02.4.04.0043 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	1.01.02.4.05.0001 Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	1.01.02.4.05.0002 Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	1.01.02.4.05.0003 Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.05 Peningkatan Mutu Akademi Komunitas	1.01.02.4.05.0004 Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.4.06.0001 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.4.06.0002 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.4.06.0003 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.4.06.0004 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.4.06.0005 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.4.06.0006 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.4.06.0007 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.06 Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP	1.01.02.4.06.0008 Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.07 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	1.01.02.4.07.0001 Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.07 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan	1.01.02.4.07.0002 Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.4.08 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	1.01.02.4.08.0001 Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/ atau Pendidikan Kedinasan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.01.03.1.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.01.03.1.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.01.03.1.02.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.01.03.1.02.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	1.01.03.1.02.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.3.02 Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus	1.01.03.3.02.0005 Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.03.4.02 Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus	1.01.03.4.02.0005 Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.3.03 Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	1.01.04.3.03.0001 Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.4.03 Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	1.01.04.4.03.0001 Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.1.02.0003 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.0004 Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.0008 Fasilitasi media publik berbahasa daerah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.0009 Penyusunan Ensiklopedia Budaya Daerah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.0010 Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.0011 Penyusunan Kebijakan Strategis

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.0012 Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.01.06.1.01.0013 Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0002 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0003 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0004 Pemberdayaan dan Pendidikan Santri
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0005 Pembinaan Manajemen Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0006 Penelitian dan Pengembangan Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0007 Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0008 Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0009 Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0010 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0011 Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/ Pesantren

PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0012 Fasilitas Pendirian Sekolah Tinggi/ Ma"had Aly
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0013 Fasilitas Akreditasi Sekolah Tinggi/ Ma"had Aly
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0014 Fasilitas dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0015 Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0016 Fasilitas Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah
PROV	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.07 PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	1.01.07.7.01 Pengelolaan Pendidikan Dayah	1.01.07.7.01.0017 Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0002 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0006 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0020 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0024 Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/ atau Berpotensi Bencana
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0024 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0030 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.0031 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.01.0041 Mendukung Pembangunan Puskesmas

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.01.0042 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialisistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0031 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0033 Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Provinsi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0034 Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0035 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0036 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0037 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0038 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0039 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0041 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0043 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0046 Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0047 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0048 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0049 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0050 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0051 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0052 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0053 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0054 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0055 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0056 Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.3.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.3.02.0057 Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.01.0041 Mendukung Pembangunan Puskesmas
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0031 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0032 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0033 Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspecialis yang mendukung penguatan layanan unggulan di wilayah Provinsi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0034 Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0035 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0036 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0037 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0038 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0039 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0040 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0043 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0046 Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0047 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0048 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0049 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0050 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0051 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0052 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0053 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0054 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0055 Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0056 Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0057 Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.4.02.0058 Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.3.02.0003 Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.3.02.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.3.02.0006 Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.3.02.0007 Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.3.02.0008 Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.3.02.0009 Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.3.02.0010 Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.3.02.0011 Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.05 Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik	1.02.03.3.05.0001 Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.06 Pendayagunaan tenaga kesehatan	1.02.03.3.06.0001 Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.07 Pendayagunaan tenaga kesehatan	1.02.03.3.07.0002 Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.3.08 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP	1.02.03.3.08.0001 Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.4.02.0003 Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.4.02.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.4.02.0006 Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.4.02.0007 Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.4.02.0008 Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.4.02.0009 Penyediaan pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.4.02.0010 Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.4.02.0011 Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.04 Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil	1.02.03.4.04.0001 Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.05 Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik	1.02.03.4.05.0001 Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.06 Pendayagunaan tenaga kesehatan	1.02.03.4.06.0001 Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.07 Pendayagunaan tenaga kesehatan	1.02.03.4.07.0002 Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.4.08 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP	1.02.03.4.08.0001 Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.3.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.3.01.0002 Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.4.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.02.05.4.01.0002 Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan

PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.07 PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1.02.07.3.01 Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	1.02.07.3.01.0001 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.07 PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1.02.07.3.01 Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	1.02.07.3.01.0002 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.07 PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1.02.07.3.01 Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	1.02.07.3.01.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.07 PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1.02.07.4.01 Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	1.02.07.4.01.0001 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.07 PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1.02.07.4.01 Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	1.02.07.4.01.0002 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)
PROV	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.07 PORGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN	1.02.07.4.01 Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta	1.02.07.4.01.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0005 Pembangunan Bendungan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0013 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0015 Pembangunan Bangunan Sabo
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0019 Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0028 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0031 Rehabilitasi Check Dam
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0048 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0055 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0071 Rehabilitasi Bendungan

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0072 Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0074 Revitalisasi Danau
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0079 Normalisasi/ Restorasi Sungai
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0080 Peningkatan Stasiun Pompa Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0081 Peningkatan Kanal Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0084 Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0085 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0088 Operasi dan Pemeliharaan Check Dam
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0089 Pembangunan Polder/Kolam Retensi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0091 Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0092 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0094 Peningkatan Tanggul Sungai
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0095 Rehabilitasi Unit Air Baku
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0097 Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0098 Pembangunan Kanal Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0099 Rehabilitasi Kanal Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0102 Pembangunan Check Dam
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0104 Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0109 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0110 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0111 Peningkatan Polder/Kolam Retensi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0117 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0123 Pembangunan Unit Air Baku
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0124 Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0125 Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0126 Pemeliharaan bangunan sabo
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0127 Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0128 Revitalisasi Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0129 Rehabilitasi bangunan pengamanan pantai
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0130 Pembangunan Embung
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0131 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0132 Pemeliharaan Sungai
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0133 Pemeliharaan danau
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0134 Rehabilitasi Embung
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0135 Pemeliharaan Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0136 Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.01.0137 Operasi dan Pemeliharaan Embung
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0005 Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0007 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0010 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0011 Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0013 Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0017 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0019 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0024 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0026 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0040 Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0041 Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0042 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0043 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0044 Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0045 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.1.02.0046 Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.3.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.3.01.0069 Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.4.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.4.01.0069 Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0018 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0021 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	1.03.03.1.01.0026 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0010 Peningkatan TPA/TPST/SPA

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0011 Optimalisasi TPA/TPST/SPA
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0012 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0013 Pembangunan TPA/TPST/SPA
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0014 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0015 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1.03.04.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0011 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0016 Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0019 Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0020 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0022 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/ Kota

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.0023 Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.0007 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.0008 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.0009 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.0011 Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.0012 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	1.03.06.1.01.0013 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0020 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0022 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0024 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0027 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0028 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0029 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0030 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0038 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0039 Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0040 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0041 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0042 Dit. PKP Bappenas: Kalimat “TPS” dapat dihapus. Mengacu pada target persampahan ke depan, peningkatan TPS dapat berorientasi menjadi TPS3R/TPST
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0043 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0044 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0045 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	1.03.07.1.01.0046 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.3.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	1.03.07.3.02.0001 Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.3.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	1.03.07.3.02.0002 Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.3.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	1.03.07.3.02.0003 Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.3.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	1.03.07.3.02.0007 Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.4.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	1.03.07.4.02.0001 Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.4.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	1.03.07.4.02.0002 Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.4.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	1.03.07.4.02.0003 Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.4.02 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP	1.03.07.4.02.0007 Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0013 Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0014 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0015 Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0016 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.1.01.0021 Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.6.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	1.03.08.6.01.0009 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.0013 Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.0014 Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.0017 Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.0018 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.1.01.0019 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0045 Pemeliharaan Rutin Jalan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0046 Penggantian Jembatan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0047 Pemeliharaan Berkala Jembatan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0048 Pembangunan Underpass
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0049 Pelebaran Jembatan

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0050 Pembangunan Terowongan/Tunnel
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0051 Pelebaran Jalan Menuju Standar
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0052 Rehabilitasi Jembatan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0053 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0054 Pembangunan Jembatan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0055 Pembangunan Flyover
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0057 Pemeliharaan Rutin Jembatan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0058 Pembangunan Jalan

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1.03.10.1.01.0059 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0009 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0010 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0013 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.1.01.0020 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.03.11.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.03.11.1.03.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.03.11.1.03.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.3.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.03.11.3.01.0009 Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.0006 Penetapan RTRW Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.0007 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.0008 Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0005 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0007 Penyusunan RTRW Provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0008 Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/ Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0009 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0010 Penyusunan Peta Dasar
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitas Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0012 Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.1.02.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.0003 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.0005 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0005 Pelaksanaan Audit Tata Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0006 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0007 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0008 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0010 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0012 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0013 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.1.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.3.02.0005 Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.3.02.0006 Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.3.02.0007 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.3.02.0008 Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.3.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.3.03.0005 Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.3.04.0005 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.3.04.0006 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.3.04.0007 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.3.04.0008 Pelaksanaan Audit Tata Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.3.04.0009 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.05 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.3.05.0001 Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.06 Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.3.06.0001 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.06 Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.3.06.0002 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.06 Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.3.06.0003 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.3.06 Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.3.06.0004 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.4.02.0005 Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/ Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.4.02.0006 Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.4.02.0007 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1.03.12.4.02.0008 Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.4.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.4.03.0005 Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.4.04.0005 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.4.04.0006 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.4.04.0007 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.4.04.0008 Pelaksanaan Audit Tata Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.4.04.0009 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR

PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.05 Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.4.05.0001 Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.06 Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.4.06.0001 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.06 Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.4.06.0002 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.06 Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.4.06.0003 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.4.06 Pengawasan Penataan Ruang	1.03.12.4.06.0004 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
PROV	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.6.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.03.12.6.03.0003 Pengelolaan Kawasan Khusus
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0007 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0009 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.0012 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan

PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0007 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0008 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi

PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0009 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0010 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.0013 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.04.0003 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.04.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.04.0005 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi

PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.04.0007 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0011 Pembangunan/ Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0012 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0013 Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0014 Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0015 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0016 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0017 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0018 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0019 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0020 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.01.0021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0008 Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/ Peremajaan/Pemukiman Kembali

PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0009 Fasilitas Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0010 Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0011 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0012 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0013 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0004 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang

PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0005 Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0007 Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0008 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.04.05.1.01.0009 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman
PROV	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.04.06.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0012 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0020 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0021 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0022 Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0023 Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0024 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0025 Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0026 Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0027 Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0028 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0029 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.05.02.1.01.0030 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0005 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0007 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0008 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0010 Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0011 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0012 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0013 Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.05.02.1.02.0014 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.0003 Pembentukan Sekretariat PPNS
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.0004 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.0007 Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1.05.02.1.03.0008 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.3.05 Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	1.05.02.3.05.0001 Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.3.05 Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	1.05.02.3.05.0002 Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.3.05 Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	1.05.02.3.05.0003 Fasilitas Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.3.05 Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	1.05.02.3.05.0004 Fasilitas Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.4.05 Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	1.05.02.4.05.0001 Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.4.05 Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	1.05.02.4.05.0002 Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.4.05 Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	1.05.02.4.05.0003 Fasilitas Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.4.05 Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi	1.05.02.4.05.0004 Fasilitas Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0022 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0025 Penyusunan Rencana Kontijensi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0026 Pengelolaan Risiko Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0009 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0025 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0026 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0027 Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemik/ Wabah Penyakit
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0029 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.0031 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0008 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/ Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0009 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0011 Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0012 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0014 Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0016 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0021 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.0024 Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0004 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0006 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0007 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0009 Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0012 Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0013 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0014 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0015 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0016 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0017 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0018 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0019 Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0020 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0021 Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0023 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0024 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0025 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0026 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0028 Penyusunan Peta Rawan Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0029 Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0030 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0031 Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0032 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0033 Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0034 Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0035 Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0036 Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0037 Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0038 Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.05.04.1.01.0039 Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0002 Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0004 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0005 Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

PROV	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.05.04.1.02.0007 Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/ Kota
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.06.02.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0006 Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0008 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0010 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0012 Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/ Kota

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0013 Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0014 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0016 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.1.02.0017 Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.06.02.3.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.3.02.0005 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.03 Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.06.02.3.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi dan bentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.3.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	1.06.02.3.04.0001 Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.4.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.06.02.4.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.4.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1.06.02.4.02.0005 Fasilitas Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.4.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	1.06.02.4.04.0001 Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1.06.03.1.01.0003 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.06.03.3.06 Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	1.06.03.3.06.0001 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.06.03.4.06 Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	1.06.03.4.06.0001 Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0016 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0017 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0019 Pemulasaraan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0020 Fasilitas Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.01.0021 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0015 Penyediaan Permakanan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0018 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0019 Pemulasaraan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0020 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0021 Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0022 Fasilitas Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.02.0023 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0015 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0016 Akses ke Layanan Kesehatan Dasar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0017 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.0018 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0013 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0014 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0015 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0016 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1.06.04.1.04.0017 Pemulasaraan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0013 Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0014 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0015 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0016 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0017 Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0018 Pemulasaraan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.06.04.1.05.0019 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.3.06 Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Laport didaerah Kabupaten/Kota.	1.06.04.3.06.0001 Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Laport didaerah Kabupaten/Kota.
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.3.06 Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Laport didaerah Kabupaten/Kota.	1.06.04.3.06.0002 Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.3.07 Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	1.06.04.3.07.0001 Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.3.08 Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	1.06.04.3.08.0001 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.3.09 Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	1.06.04.3.09.0001 Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.4.06 Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	1.06.04.4.06.0001 Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.4.06 Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	1.06.04.4.06.0002 Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.4.07 Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	1.06.04.4.07.0001 Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0009 Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0010 Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0011 Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.0012 Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.03 Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP.	1.06.05.3.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.04 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.3.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.05 Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	1.06.05.3.05.0001 Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.3.06 Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	1.06.05.3.06.0001 Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.4.03 Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP.	1.06.05.4.03.0001 Fasilitas Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.4.04 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.4.04.0001 Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.4.05 Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	1.06.05.4.05.0001 Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.4.06 Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.06.05.4.06.0001 Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0011 Penyediaan Sandang
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0013 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0015 Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0016 Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0017 Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0018 Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0019 Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0020 Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0021 Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresarian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0022 Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam
PROV	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.0023 Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana

Lampiran III. Daftar Organisasi Masyarakat Sipil Kelompok Rentan

A. Organisasi Penyandang Disabilitas

No	Nama Lembaga	Lokasi Kerja	Alamat/ Contact Person
1	Garamin (Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi) – NTT	Propinsi NTT, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao,	Jalan Noelmina Dalam, 7A, RT 003, RW, 001, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT Email : garaminntt@yahoo.com/ garaminntt2020@gmail.com Website : http://garamin.org Facebook : Garamin Ntt Instagram : Garamin NTT Narahubung : Yafas A. Lay (Direktur): 081997988296 Elmi Ismau (Wakil Direktur) : 082339485302
2	Forum Belarasa Penyandang disabilitas Nian Sikka atau FORSADIKKA	Maumere	Jl. Mgr Soegyopranoto No 1, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Maumere 86111. Kontak Person: Ellen 081353234515 Email : elleonoramargita@yahoo.co.id
3	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Cabang Kota Kupang	Kota Kupang	Jl. TDM 2 RT.10 RW.03, Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR. Kontak Person: I Made Astika Dhana (Sekretaris) Hp 085253522019 Email: pertuni.dpckotakupang@gmail.com
4.	Pelita Harapan Disabilitas Flobamora (PHDF)	Kota Kupang	Jl. Damai No.351, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kotaraja, Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR. Kontak Person : Rina Astuti (Staf) Hp: 085323455800 Alamat email : phdfflobamora02@yahoo.com smartkoboy@gmail.com Facebook : Pelita Harapan Disabilitas Flobamora

5	Perhimpunan Mandiri Kusta (PERMATA)	Kota Kupang	Jl. Penkase RT.002/RW.001, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR Kontak Organisasi : HP/ WA Paulus Manek (ketua): 082145027226 e-mail: permataidonesia.org
6	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	Kota Kupang, Malaka, Sikka, Manggarai barat)	Kontak Person: Petronela Sau Naikofi, SE. Telp/ WA :085237179972 email: petronelanaikofi926@gmail.com
7	Komunitas Tuli Kupang	Kota Kupang	Jl. Bajawa GangMekar 3, RT 044, RW 013, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, 85111 Kontak Telp/ WA : Mario Lado (Ketua) 081236737356 Email : darcolado@gmail.com
8	Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (PERSANI)	Kota Kupang	Jalan Oelon III, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Kontak Telp/ WA : Ketua (Serafina Bete) 082145272095 Email : persaniNusa Tenggara Timur@yahoo.co.id Facebook : Persani Nusa Tenggara Timur Instagram : Persani Nusa Tenggara Timur
9	Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) Timor Tengah Selatan	Kab TTS	Jl. Johar belakang SPBU KM 3 gang 3 kiri, Desa Kesenana, Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kontak Telp/WA : Facebook : Grup KIPDA TTS
10	Persama (Perkumpulan penyandang Disabilitas Malaka	Kab Malaka	RT 02/RW 01, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Kontak Telp/ WA : Ketua (Sinda Atok) 081337488130 Email : sindaatok@gmail.com Facebook : Persama Malaka

11	Yayasan Dola Koyakoya	Kab Alor	Jl. Sam Ratulangi, RT.09/RW.04, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Kontak Telp/ WA : Ketua (Ell Asamau) 081353440315 Email : elyasadamau@gmail.com Facebook : dolakoyakoya Website : www.dolakoyakoya.com INFO@DOLAKOYAKOYA.COM
12	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kab. Ngada	Kab Ngada	Jalan Palapa No.8, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Kontak Telp/ WA : Ketua (Maria Elisabeth Tunga Toa) 081322402911 Email : elsatoa88@gmail.com
13	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kab. Sumba Timur	Kab Sumba Timur	Jalan Umbu Taranggaha No.04, RT 01/RW 03, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur Kontak Telp/ WA : Ketua (Roberth Oktavianus riwu) 081339155377 Email : robertriwu74@gmail.co
14	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kab. Manggarai Barat	Kab. Manggarai Barat	Kompleks SLB Negeri Komodo. Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Labuan Bajo Kontak Telp/ WA : Sekretaris (Anselmus G Kartono) 081338425115 Email : ansekkartono@gmail.com
15	Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kab. Manggarai	Kab. Manggarai	Jalan Nasution No.1, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kontak Telp/ WA : Ketua (Sabinus Ngadu,S.Pd) 081236500799 Email : pertuniruteng@gmail.com
16	National Paralimpic Committee (NPC) Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Jalan Banteng Nomor 07, Jalan Banteng Nomor 07, RT 20/RW 4, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT Kontak Telp/ WA : Ketua (Viktor H Haning) 082147358817 Email : Nusa Tenggara Timurnpc@gmail.com

17	Yayasan Kita Keluarga Insani	Kab Ende	Jalan Woloare B, Lingkungan Kazoza, RT 007/RW 007, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara kabupaten Ende. Kontak Telp/ WA : Pendamping (Avent Saur) 085239603323 Email : aventsaur@yahoo.co.id Facebook: Kelompok Kasih Insanis (Relawan Peduli ODJG Prov NTT) Youtube : Kasih Insanis Channel
18	Kumpulan Penyandang Disabilitas (KUMPESA) Rai Belu	Kab Belu	Jalan Pramuka, RT 017/RW 006, Kelurahan Bei Rafu, Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu Kontak Telp/ WA : Ketua (Samuel) 081328499183,081238924105 Email : kumpesaraibelu2019@gmail.com

B. Organisasi Perempuan/Gender

No	Nama Lembaga	Lokasi Kerja	Contact Person
1.	PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) - NTT	Provinsi NTT	Susan (+62 822-9243-6850)
2.	PUSPA NTT	Provinsi NTT	Veronika Ata (+62 812-3617-9074)/ Ana Djukana (+62 821-4753-7259)
3.	CIS Timor	Provinsi NTT Seluruh wilayah NTT	Harris Oematan +62 812-3628-8973
4.	Rumah Harapan GMIT	Provinsi NTT Seluruh wilayah NTT	Ester Mantaon (+62 852-3934-7398)
5.	Pusat Studi Hukum HAM dan Gender (PUSHAMG) UNWIRA	Seluruh wilayah NTT	Ernes Wahon (+62 813-3929-2506)
6.	Pusat Studi Gender Undana	NTT	Dr. Detji Nuban, SH, M.Hum (+62 823-2354-4873)
7.	Bengkel APPEK	Kota Kupang, Kabupaten Kupang	Thres Ratunubi (+62 812-3794-1011)

8.	Ume Daya Nusantara (UDN)	Kabupaten Kupang (daratan Timor dan Semau)	Damaris Tnunai (+62 821-1264-4116)
9.	LBH APIK NTT	NTT	Jl. Sam Ratulangi II No.33, Klp. Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228, Indonesia CP: Ansy Rihi Dara (+62 813-3941-4508))
10.	Rumah Perempuan Kupang	NTT	Libby SinlaEloE (+62 813-3399-9514)
11.	Yayasan Tanpa Batas - Kupang	NTT	Deni Sailana (+62 813-3333-1476)
12.	Yayasan SSP -TTS	TTS	Rambu Mella (+62 852-5339-1893)
13.	Yayasan Bife Kuan - TTU	TTU	Frida Ikun (+62 812-8049-5471)
14.	TRUK F - Sikka	SIKKA	Henny (+62 813-3932-6340)

C. Organisasi Anak

No	Nama Lembaga	Lokasi Kerja	Alamat/Contact Person
1.	Lembaga Perlindungan Anak NTT	Kota Kupang	Ester Day (+62 813-3943-8487)
2.	PKBI - NTT	NTT	Mody Taopan (+62 853-3903-4215)
3.	Forum Anak NTT	NTT	Victor Kono (+62 812-3663-4955)
4.	Pelayanan Anak, Remaja dan Taruna (PART) Sinode GMIT	NTT	Pdt. Melsi Moy (+62 852-3907-6001)
5.	Komisi Anak Keuskupan Agung Kupang	Kota & Kab Kupang, TTS, Alor, Rote, Sabu	Rm. Nani Kartiba (+62 853-3984-8151)

D. Organisasi Kelanjut Usia

No	Nama Lembaga	Lokasi Kerja	Alamat/Contact Person
1.	Komda Lansia NTT	Provinsi dan Semua Kab/ Kota	Vinsentius S. Meda (+62 812-3608-4165)

2.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia	Provinsi	Yohanis Kosapilwan (+62 821-4432-8171)
3.	LKS Anugrah Deo	Kota Kupang	Corrie Wadu Lay Rade (+62 813-3928-2713)
4.	UPP Lansia Gereja Paulus		

E. Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (Binaan Dinas Sosial Provinsi NTT)

1. Anak

NO	NAMA LKS/ PANTI ANAK	KABUPATEN
1	Damian	Alor
2	Amal Iklas	Alor
3	LKSA Bina Bunga Bangsa	Belu
4	Pondok Mercy	Belu
5	Sulu Obor	Belu
6	Santo Yoseph Nenuk	Belu
7	Panti Asuhan Al-Barah	Flores Timur
8	Maria Hamba ALLAH	Flores Timur
9	St. Eugene Smit	Lembata
10	St. Wilhemus	Lembata
11	St. Don Bosco	Lembata
12	LKSA Asuhan Ceria – Noelbaki	Kupang
13	LKSA YAPI Noelbaki	Kupang
14	LKSA Roslin	Kupang
15	Yayasan Elpida	Kupang
16	Yayasan Amanah	Kupang
17	PA Missionaris Of The Poor Labuan Bajo	Manggarai Barat
18	LKSA Pelayanan Kasih	Manggarai
19	LKSA Asuhan Kasih	Manggarai
20	LKSA Somascan	Manggarai

21	LKSA Sesamamu	Manggarai
22	PantiBundaPengANTARaRahmatMalawatar	Manggarai Barat
23	RumahSinggahAnak Dan Perempuan Sta. Elisabet	Manggarai Barat
24	PantiRemajaPutri Maria Helena Stollenwerk	Manggarai Barat
25	PantiRemaja Theresa KalkutaDatak	Manggarai Barat
26	LKSA Al-QalamTompong	ManggaraiTimur
27	LKSA Rosa MistikaWaerana	ManggaraiTimur
28	Yayasan Mercy Indonesia Rote	Rote Ndao
29	Sta. Elisabeth NaunganKasih	Ende
30	LKSA Walisongo	Ende
31	Sta. Theresa Avila More Manggo	Ende
32	LKSA Clara Fey Maronggela	Ngada
33	PantiSosialBinaRemaja St YosefRiung	Ngada
34	SOS DesaTaruna Flores	Sikka
35	UmmulMukmininHafsah	Sikka
36	Andreas Fey Magepanda	Sikka
37	Clara Fey Maulo'o	Sikka
38	LKSA Mercy Indonesia	Sumba Barat
39	LKSA St. Yosef	Sumba Barat
40	LKSA Global Obor Indonesia	Sumba Barat
41	LKSA Sumba Mekar	Sumba Barat Daya
42	LKSA Clara Fey manola	Sumba Barat Daya
43	BundaNirmala	Sumba Barat Daya
44	SinarKasih	Sumba Barat Daya
45	HatiNurani Sumba	Sumba Barat Daya
46	RatuRosari	Sumba Barat Daya
47	PantiAsuhanHammuPangia	Sumba Timur
48	PantiAsuhanYahaziel	Sumba Timur
49	PantiAsuhanSt.Mikhael	Sumba Timur
50	PantiAsuhanBeana Maria StollenwerkLewa	Sumba Timur

51	PantiAsuhan Kristen 263 Prailiu	Sumba Timur
52	PantiAsuhanPeduliKasihKahaungaEti	Sumba Timur
53	PantiAsuhan St. ArnoldusPalakahembi	Sumba Timur
54	SinarHarapan	Sumba Tengah
55	SeraphineKatikuloko	Sumba Tengah
56	Imanpengharapandankasih	Sumba Tengah
57	PondokKarya Timor	Timor Tengah Selatan
58	Ume Manekan	Timor Tengah Selatan
59	Mercy Lily	Timor Tengah Selatan
60	Anugerah	Timor Tengah Selatan
61	LKSA KKP ReinhaRosari Noemuti	Timor Tengah Utara
62	LKSA STA. Theresia Eban	Timor Tengah Utara
63	LKSA DevinaProfidentiaMaubesi	Timor Tengah Utara
64	LKSA STA. Khatarina Mena	Timor Tengah Utara
65	LKSA STA. Maria Manufui	Timor Tengah Utara
66	LKSA MarganingsiWini	Timor Tengah Utara
67	Kasih Agape	Kota Kupang
68	Syalom	Kota Kupang
69	Generasipengubah	Kota Kupang
70	Louis De Monfort	Kota Kupang
71	Aisyiyah	Kota Kupang
72	Rosa Mystica	Kota Kupang
73	Sonaf Maneka	Kota Kupang
74	GMIT 221	Kota Kupang
75	Kristen petra	Kota Kupang
76	Attin	Kota Kupang
77	Al-Hikmah	Kota Kupang
78	Nurul Sa'adah	Kota Kupang
79	PuriBunda	Kota Kupang

2. Lanjut Usia

No.	Nama LKS Lanjut Usia	Kabupaten
1	Yayasan Gunthild Karitas Peduli (YGKP)	Flores Timur
2	Panti Jompo Santa Anna Yayasan MGR. Gabriel Manek, SVD	Flores Timur
3	Panti Jompo ST. Elisabet Lela	Sikka
4	Panti Lansia Wisma Henricus	Ende
5	Panti Jompo St. Anna Yayasan Maria Virgo	Belu
6	Panti Jompo St. Joseph Nenuk	Belu

3. Penyandang Disabilitas

No.	Namal LKS/PANTI	Kabupaten
1	PA. Bhakti Luhur A , Souverdi Kupang	KOTA KUPANG
2	Yys. Bhakti Luhur B, Sikumana Kupang	
3	PA. Kasih Kupang	
4	PA. Bhakti Luhur Baumata Kupang	KUPANG
5	Yys. Brayat Pinuji	TTU
6	Yayasan Bunda Pembantu Abadi (Panti Rehabilitasi Kusta Naob)	
7	Hardinan Haklaran, Tenubot	BELU
8	PA. Bhakti Luhur, Alma Atambua	
9	Pusat Rehabilitasi, Hidup Baru	
10	PAC. Damian Weri	FLORES TIMUR
11	PA. St. Ignasia	
12	YPD. PA. Acamistar	
13	Panti Rehabilitasi, Kusta Damian Lewoleba	LEMBATA
14	PA. St. Aloysius Wairklau	SIKKA
15	PAC. St. Maria, Paudodo	
16	Pac. Maria Stella, Maris Nangamure	
17	Panti Rehabilitasi St., Dymphna Wairklau	
18	PA. Jie Pama Pawe	
19	PAC. Bhakti Luhur, Cab. Ende	ENDE

20	PAC. Bhakti Luhur, Alma Boawae	NAGEKEO
21	PAC. Bhakti Luhur, Cab. Mundemi	
22	PAC. Bhakti Luhur, Boanio	
23	PA. Bhakti Luhur, Cab. Bajawa	NGADA
24	Yayasan Citra Ngada	
25	Yayasan Karya, Murni Ruteng	MANGGARAI
26	Yayasan St. Damian Cancar	
27	Panti Rehabilitasi, Renceng Mose	
28	YYSN ST. Damian; Binongko	MANGGARAI BARAT
29	PA. Bhakti Luhur; Cab. Waingapu	SUMBA TIMUR
30	PA. Bhakti Luhur; Putri Waikabubak	SUMBA BARAT

